

# SINERGI



**Dukungan Masif  
Infrastruktur PUPR Untuk  
Lima Destinasi Pariwisata  
Super Prioritas**

Ikuti  
Kuis BPIW  
di hal.61





**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)  
KEMENTERIAN PUPR**



**Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR**  
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210  
Email: humasbpiw@gmail.com Telp. +6221-2751 5804

**Salam Sinergi** .....

Pembaca yang terhormat, Buletin Sinergi telah memasuki edisi 40, Juni-Juli 2019. Pada edisi kali ini tema besar mengulas mengenai dukungan infrastruktur sektor PUPR terhadap lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas yakni Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika-Lombok, Danau Toba, dan Likupang.

Tema itu sejalan dengan yang sedang dilakukan BPIW yakni penyusunan *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP). Topik ini juga menjadi salah satu isu hangat di beberapa media, mengingat Presiden Joko Widodo sempat meninjau Labuan Bajo dan Danau Toba.

Disamping itu, BPIW saat ini tengah membuat Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Pedoman Penyusunan Rencana, Program dan Penganggaran Pengembangan Infrastruktur PUPR. Dengan adanya Rapermen ini, maka ada peraturan yang jelas dan peraturan itu sekaligus turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Dalam rubrik Wawancara menghadirkan Deputy Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata, Dadang Rizki Ratman. Dalam artikel tersebut ia menyampaikan mengenai beberapa hal seperti tugas utama dan fokus program yang dilakukan unit kerjanya dan tanggapannya terkait koordinasi yang dilakukan Kementerian Pariwisata dengan BPIW selama ini.

Selain itu juga tetap ditampilkan beberapa rubrik ringan seperti Tips, Serba-serbi dan Potret. Souvenir cantik masih disediakan redaksi bagi pembaca yang bisa menjawab pertanyaan di rubrik Kuis BPIW.

Kami berharap sajian informasi yang kita tampilkan di Buletin Sinergi ini dapat memenuhi harapan pembaca serta memperkaya pengetahuan terkait pembangunan infrastruktur bidang PUPR.

Salam hormat,

**Redaksi**



## Tim Penyusun

**Pengarah:**  
Hadi Sucahyono

**Penanggung Jawab:**  
Firman Hatorangan Napitupulu

**Penasihat**  
Bobby Prabowo  
Iwan Nurwanto  
Kuswardono  
Agusta Ersada Sinulingga

**Pemimpin Redaksi**  
P. Yudiantoro

**Redaktur Pelaksana**  
Shoviah

**Staf Editor :**  
Hendra Djamal  
Mutri Batul Aini

**Tim Pembuat Artikel:**  
Indira Dwi Kusumatuti  
Daris Anugrah  
Alis Listalatu  
Rian Farhan  
Tim Kontributor Pemberitaan

**Sekretariat:**  
Untung Priyono  
Nur Wahyu

**Diterbitkan oleh:**  
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah  
(BPIW) Kementerian PUPR

**Alamat Redaksi:**  
Gedung G, BPIW Lantai 1  
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12110  
Email: humasbpiw@gmail.com, humasbpiw@pu.go.id  
Website: bpiw.pu.go.id  
No. Telp. +6221-2751 5804

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:  
humasbpiw@gmail.com, humasbpiw@pu.go.id

Design Grafis : Heri Hito  
Infografis, layout & Kartunis : Ajeng Ayuning Pertiwi



10 **Opini Pakar:**  
Taufik Widjoyono :  
Pengembangan Kawasan Pariwisata  
Membutuhkan Empat Pilar

12 BPIW Diharapkan Turut Mengawal  
Implementasi Pembangunan Pariwisata



14 **Wawancara:**  
Dadang Rizki Ratman, S.H., M.P.A:  
Infrastruktur Lancar, Promosi Pariwisata  
Semakin Gencar



20 **Info Produk BPIW:**  
Tanjung Lesung  
"Holiday Resort"

28 **Teropong Media**

32 **Laporan Khusus:**  
Fungsi BPIW Penting untuk Direvitalisasi

48 **Infografis:** Kawasan Pariwisata Super  
Prioritas

50 **Jalan-Jalan:**  
Permata Indah  
di Timur Indonesia

62 **Kilas BPIW**  
BPIW Dukung Percepatan Pembangunan  
di Malut



56 **Serba-Serbi**  
Inilah 5 Destinasi Wisata yang Semakin  
Mudah Diakses Wisatawan

## 4 **Kabar Utama:** Dukungan Masif Infrastruktur PUPR Untuk Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas



## Dukungan Masif Infrastruktur PUPR Untuk Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Pemerintah telah menetapkan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara masif turut memberikan dukungan infrastruktur yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Di dunia internasional, Indonesia dikenal dengan keindahan alam Pulau Dewata, Bali. Namun kini, pemerintah terus mempromosikan sejumlah destinasi wisata lain yang disebut "Bali Baru". Dari 12 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) "Bali Baru" tersebut, pemerintah menetapkan empat Destinasi Pariwisata Super Prioritas yakni Borobudur di Jawa Tengah, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT), Mandalika/ Lombok di Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Danau Toba di Sumatera Utara. Namun pada akhirnya, pemerintah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang di Manado Sulawesi Utara

menjadi Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang kelima.

Tidak sekedar menetapkan, progres dari pengembangan destinasi wisata tersebut juga dipantau. Hal ini terlihat dari langkah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang langsung turun ke lapangan untuk melihat langkah-langkah yang telah dilakukan Kementerian/ Lembaga terkait. Jokowi bersama beberapa menteri termasuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, 11 Juli lalu, melakukan peninjauan di beberapa tempat di KSPN Labuan Bajo seperti Puncak Waringin yang akan dikembangkan



Lima destinasi pariwisata itu menjadi super prioritas, karena pemerintah melihat tren jumlah turis yang datang cenderung terus meningkat.

dan ditata menjadi sebuah kawasan pariwisata baru.

Usai mengikuti kunjungan itu, pada malam harinya di kawasan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono melakukan koordinasi dengan para pejabat yang mewakili empat sektor di PUPR yakni Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, dan Sumber Daya Air (SDA). Tidak hanya itu, rapat juga dihadiri Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaya dan Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo Flores Shana Fatina yang mewakili Kementerian Pariwisata.

Saat memimpin rapat tersebut Hadi menegaskan keterpaduan antar Kementerian/Lembaga memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan pariwisata di kawasan tersebut. Ada tiga *key tourism* Labuan Bajo yang akan dikembangkan dan mendapat dukungan penuh Kementerian PUPR. Pertama, wisata bahari di Pulau Rinca, Pulau Padar, dan Pulau Komodo. *Key tourism* yang kedua, Labuan Bajo sebagai eko wisata. *Key tourism* ketiga yang berada di arah timur NTT yaitu Ruteng.

“Sebenarnya secara reguler sejak 2015 kita sudah memiliki perencanaan dan program pengembangan di kawasan Labuan Bajo, tapi sekarang dengan kunjungan Presiden lebih digiatkan lagi,” tutur Hadi.

Kemudian, pada 31 Juli, Jokowi mengunjungi beberapa destinasi wisata di KSPN Danau Toba. Ia juga sempat meninjau pekerjaan pelebaran alur terusan Tano Ponggol Pangurusan, Kabupaten Samosir yang sedang dikerjakan Kementerian PUPR. Jokowi mengatakan,

membangun infrastruktur di kawasan Danau Toba harus diprioritaskan guna mewujudkan kawasan ini sebagai daerah wisata internasional mengikuti jejak Pulau Bali.

Kunjungan tersebut dilakukan ditengah-tengah penyusunan *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP) yang dilakukan BPIW terhadap tiga KSPN yakni Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika.

Sebagaimana diketahui bahwa ITMP merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta rencana program *Infrastructure for Tourism*.

Fokus dari pembuatan ITMP ini tidak hanya pada rencana pembangunan infrastruktur PUPR semata, tapi juga hal-hal lain yang berkaitan dengan optimalisasi pengembangan destinasi wisata. Adapun tujuan dari program ITMP ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan serta infrastruktur dasar pariwisata, meningkatkan perekonomian lokal/masyarakat dari pembangunan pariwisata, dan mendorong investasi swasta.

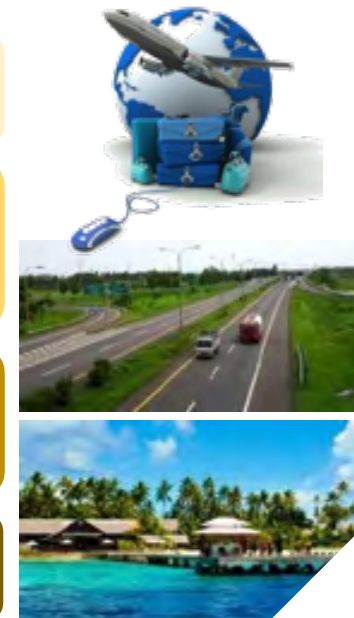
Lima destinasi pariwisata itu menjadi super prioritas, karena pemerintah melihat tren jumlah turis yang datang cenderung terus meningkat. “Jadi memang potensial sekali. Jadi antara investasi yang kami keluarkan dengan potensi devisa dari para turis itu akan berimbang,” ujar Hadi Sucahyono. Seperti apa dukungan infrastruktur terhadap kelima kawasan itu? berikut uraiannya :

#### Danau Toba

Banyak program pembangunan infrastruktur sektor PUPR pada 2019 seperti Pembangunan Penyediaan Air Baku Dolok Sanggul di Kabupaten

## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK KAWASAN PARIWISATA STRATEGIS

- 1 Menyiapkan kriteria kesiapan/*readiness criteria* untuk investasi infrastruktur pariwisata.
- 2 Menyediakan skema keuangan yang berkelanjutan untuk investasi pariwisata melalui penyiapan Studi Kelayakan, Amdal, *Detailed Engineering Design* (DED), pembebasan lahan.
- 3 Membiayai pembangunan fisik seperti air bersih dan sanitasi, jalan, listrik, drainase, limbah padat, anjungan cerdas, museum, ruang terbuka hijau, dan lanskap.
- 4 Mendorong dunia usaha dan masyarakat, BUMN, dan BUMD.



Humbang Hasundutan sepanjang 7 Km, Preservasi dan Pelebaran Jalan T.Tinggi-P.Siantar-Parapat Jalan Lingkar Luar Parapat di Kabupaten Simalungun sepanjang 43,88 Km, dan Penataan Bangunan KSPN Prioritas-Danau Toba Kawasan *Rest Area* Silangit-Parapat (Taman Kota Balerong-Balige) Kabupaten Toba Samosir.

Dalam mendukung konektivitas di KSPN Danau Toba, di 2020 mendatang Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, membangun infrastruktur diantaranya Jembatan Tano Pangol di Kabupaten Samosir sepanjang 1,2 km dengan masa pelaksanaan tahun 2020 - 2021. Kemudian Preservasi dan Pelebaran Jalan Lingkar Samosir.

Terkait tinggi jembatan yang akan dibangun, dari hasil studi kelayakan (FS) yang dilakukan BPIW menunjukkan tinggi jembatan tidak perlu dibangun terlalu tinggi, sehingga tidak memerlukan anggaran yang besar. Hal ini sejalan

dengan keinginan Bank Dunia yang turut memberikan pinjaman di dalam pembangunan jembatan tersebut.

#### Labuan Bajo

Sejumlah program infrastruktur PUPR pada 2019 di KSPN ini seperti lanjutan Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Waekemiri di Kabupaten Manggaran Barat sepanjang 0,35 Km, Preservasi Jalan Labuan Bajo-Malwatar (Penanganan Longsor Jalan di Kabupaten Manggarai), Pembangunan Jalan Labuan Bajo-Terang-Pelabuhan Bari I dan II, serta Pembangunan Permukiman Perdesaan Potensial seluas 21 Ha.

Tahun 2020, beberapa program infrastruktur untuk KSPN Labuan Bajo seperti Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kabupaten Maggarai 300 unit, dan Pembangunan Jalan Lingkungan sepanjang 2,5 Km di Kabupaten Manggarai Barat. “Presiden memberikan arahan agar pelabuhan harus dipisah kegunaannya, yakni antara untuk turis dan juga kargo. Jadinya, nanti

Dalam mendukung konektivitas di KSPN Danau Toba, di 2020 mendatang Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, membangun infrastruktur diantaranya Jembatan Tano Pangol di Kabupaten Samosir sepanjang 1,2 km dengan masa pelaksanaan tahun 2020 - 2021.



*Pada 2020, program yang disusun BPIW masih difokuskan pada pengembangan infrastruktur mendukung pariwisata.*

pelabuhan yang lama dibenahi untuk dapat disandari *yacht* atau kapal pesiar,” ungkap Hadi.

Sebagai kawasan wisata premium, nantinya yang menjadi target adalah wisman yang menginap di kapal pesiar. Disamping itu nantinya akan dibenahi pasar, tempat kuliner, kawasan kumuh, dan gardu pandang.

#### **Borobudur**

Sejumlah program pembangunan infrastruktur PUPR di KSPN tersebut seperti Pembangunan Embung Giwangan Kota Yogyakarta, *Toll Road Development of Solo-Kertosono Project Phase 1* sepanjang 2,75 Km di Kabupaten Magelang, dan Penataan Kawasan Wisata Air Terjun Sukomakmur Kabupaten Magelang.

Sedangkan program untuk 2020 beberapa diantaranya adalah Pembangunan Rusunawa Pekerja Pariwisata untuk KSPN Borobudur, Peningkatan infrastruktur Kawasan Perdesaan Potensial Kawasan Strategis Nasional (KSN) Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Sleman seluas 6 Ha.

Tahun depan, akan dilakukan kegiatan berupa penataan kawasan permukiman Borobudur dengan membangun Gerbang Palbapang dan Penataan Koridor Jalan Mayor Kusen, pembangunan Gerbang Klagon dan penataan jalan Klaben, Gerbang Wisata Borobudur serta Penataan parkir, *Drop Off* dan Koridor pedagang Kaki Lima di kawasan Candi Mendut.

#### **Mandalika/Lombok**

Sejumlah program infrastruktur KSPN Mandalika/Lombok di 2019 seperti Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Lombo Timur yang tersebar di tujuh titik, Penggantian Jembatan Sokong A sepanjang 60 meter, Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya sebanyak 4.500 unit.

Pada 2020 sejumlah program di KSPN ini seperti Pembangunan Rumah Susun Pekerja Pariwisata KEK Mandalika di Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 58 unit, Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kawasan Mandalika Kabupaten Lombok Tengah, dan Jaringan Irigasi DI Pengga di Kabupaten Lombok Tengah sepanjang 6 Km.

Kemudian di 2020, akan dilakukan pembangunan Jalan Bandara Internasional Lombok (BIL) – Kuta Mandalika dengan panjang 17 Km dan lebar 25 m, pembangunan Promendede, Pengembangan Kawasan Gili, dan pengembangan Geopark Rinjani.

#### **Likupang**

Kemudian untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang akan diselesaikan pembangunan Bendungan Kuwilkawangoan di Kabupaten Minahasa Utara, peningkatan Jalan Akses Likupang, pembangunan Jembatan Bitung – Pulau Lembeh, Jalan Tol Manado – Bitung, penataan Kawasan Bunaken, penataan Kawasan Pantai Malalayang, dan Kawasan Wisata Pantai PAAL – Likupang.

#### **Dukungan Infrastruktur Untuk Pariwisata Jadi Fokus BPIW**

Dengan disiapkannya program infrastruktur untuk lima destinasi pariwisata itu, maka pada 2020, program yang disusun BPIW masih difokuskan pada pengembangan infrastruktur mendukung pariwisata. Apalagi pada kenyataannya, melalui pariwisata akan mendapatkan devisa paling cepat dan dengan investasi yang tidak terlalu besar.

Pengembangan pariwisata nasional masih dihadapkan masalah klasik yakni terbatasnya anggaran pemerintah, sementara program yang akan dikembangkan banyak. Untuk itu, diluar APBN, pemerintah mengupayakan melalui skema kerja



*Komodo di Pulau Rinca menjadi daya tarik wisatawan.*

Sumber: BPIW

sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Selain itu juga dengan pihak swasta. Saat ini investasi banyak ditanamkan di jalan tol dan air minum, karena di sektor itu, pihak swasta dapat balik modal dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dalam membuat program dukungan infrastruktur sektor PUPR terkait pariwisata, BPIW melakukan kerja sama, tidak hanya dengan unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR maupun dengan Kementerian/Lembaga lain terkait seperti dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pariwisata, dan Agraria dan Tata Ruang.

Kerja sama dengan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga dilakukan, hal ini terkait aspek keamanan lingkungan

dari perencanaan infrastruktur yang dibuat.

Dengan program ITMP maupun program BPIW lainnya, pada akhirnya *outcome*-nya berupa meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar. *Outcome* lainnya adalah kemiskinan dan pengangguran dapat berkurang.

**(Redaksi)**

*Saat ini investasi banyak ditanamkan di jalan tol dan air minum, karena di sektor itu, pihak swasta dapat balik modal dalam waktu yang tidak terlalu lama.*





### Taufik Widjoyono

Ketua Tim Pemantauan dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (TPE-PSN)

Kementerian PUPR dan juga Ketua *Central Project Monitoring Unit-Indonesia Tourism Development Project (CPMU-ITDP)* Kementerian PUPR

## Pengembangan Kawasan Pariwisata Membutuhkan Empat Pilar

Dalam hal pengembangan pariwisata dalam program nasional Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Infrastruktur sektor PUPR bersifat sebagai pendukung. Semula, jumlah KSPN Super Prioritas yang didukung Kementerian PUPR ada tiga, yakni Borobudur Jawa Tengah, Mandalika-Lombok NTB, dan Danau Toba Sumatera Utara. Namun karena mendesak, maka ditambah Labuan Bajo NTT. Namun pada akhirnya ada tambahan lagi yang harus didukung infrastruktur sektor PUPR, yakni kawasan wisata di Likupang, Manado. Jadi ditargetkan pada 2020, infrastruktur sudah mengubah tampilan kawasan itu pesan Presiden.

Pengembangan kawasan pariwisata tersebut ditopong atau didukung oleh empat pilar. Pertama, harus didukung secara kelembagaan, dimana dibutuhkan koordinasi antar pusat dan daerah. Selain itu dibutuhkan koordinasi antar

Kementerian/Lembaga terkait. Pilar ke dua yakni infrastruktur yang membutuhkan dana yang besar. Namun infrastruktur tidak ada artinya kalau kelembagaannya tidak memadai.

Kemudian pilar yang ketiga, adalah partisipasi masyarakat pelaku pariwisata. Partisipasi masyarakat ini bisa dari sisi pemenuhan atraksi atau misalnya usaha kecil menengah untuk pengembangan pariwisata tersebut. Selanjutnya pilar yang keempat adalah investasi. Investasi diperlukan dalam membangun infrastruktur yang membutuhkan anggaran yang besar.

Dukungan infrastruktur sudah cukup masif. Hal ini merupakan dukungan penuh dari jajaran pimpinan di Kementerian PUPR baik dari Pak Menteri maupun Dirjen maupun dari Kepala Badan seperti Kepala BPIW. Dukungan infrastruktur ini sudah berjalan sejak tahun lalu dan kedepan akan terus dilanjutkan.



Pengerjaan pelebaran terusan perairan di kawasan Danau Toba dengan konsep waterfront city di Tano Ponggol Kab Samosir.

Sumber: PUPR

Jadi yang menjadi sasaran dalam pembangunan infrastruktur adalah pengembangan kawasan. Disini kontribusi BPIW diperlukan sebagai perancang kawasan dan Cipta Karya yang merealisasikan pembangunan infrastruktur untuk kawasan tersebut. Infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR berhubungan dengan aksesibilitas yakni dalam bentuk pembangunan jalan maupun juga trotoar.

Tidak hanya melibatkan Ditjen Cipta Karya yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur permukiman dan pelayanan dasar seperti air, sanitasi, dan pengolahan sampah maupun Ditjen Bina Marga yang membangun jalan dan jembatan, dalam sebuah kawasan juga membutuhkan keterpaduan dengan Ditjen lain. Misalnya di suatu kawasan membutuhkan air, maka disitu ada dukungan dari Ditjen Sumber Daya Air untuk menyediakan air baku.

Dan kawasan berkembang jangan sampai justru ada rumah-rumah kumuh. Untuk itu pengembangan kawasan juga memperhatikan masalah perumahan masyarakat. Ditjen Perumahan berperan disitu untuk memperbaiki kualitas rumah.

Banyak program-program yang harus kita percepat. Contohnya pengembangan Kawasan

Labuan Bajo, ditargetkan dapat mengubah kawasan pantainya di akhir 2020. Selain itu destinasi wisata di sekitar Danau Toba sudah harus dibenahi pada tahun itu.

BPIW harus bekerja keras dan cepat dalam menyiapkan ITMP yang saat ini sedang dikerjakan. Perlu juga dilakukan dialog interaktif secara intens dengan berbagai pihak sehingga ITMP dan pembangunan fisik infrastruktur di kawasan super prioritas bisa berjalan bersamaan.

Tujuan utama pengembangan KSPN Super Prioritas tersebut adalah peningkatan jumlah wisatawan, waktu berkunjung mereka lebih lama dan mereka membelanjakan uangnya lebih banyak di Indonesia. Disamping itu dengan didukung infrastruktur PUPR, maka ketika kunjungan wisatawan meningkat, akan berdampak juga pada peningkatan pendapatan asli daerah.





### Shana Fatina

Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores

Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo Flores dibentuk oleh Presiden sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia melakukan percepatan pembangunan terintegrasi pada Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagai Destinasi Prioritas, dengan koordinasi dan sinkronisasi program lintas Kementerian Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten yang terkait, sehingga tercapai target devisa dari kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik.

Sesuai dengan amanah Perpres No. 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, BOP Labuan Bajo memiliki tugas pokok melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi terhadap perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di **zona koordinatif** Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores. Tugas lainnya adalah melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di **zona otorita** Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores. Zona Koordinatif (BOP) Labuan Bajo Flores meliputi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)

## BPIW Diharapkan Turut Mengawal Implementasi Pembangunan Pariwisata

Komodo dan sekitarnya, KPPN Labuan Bajo dan sekitarnya, KPPN Ruteng dan sekitarnya, KPPN Bajawa dan sekitarnya, KPPN Ende-Kelimutu dan sekitarnya, KPPN Maumere-Sikka dan sekitarnya, KPPN Larantuka dan sekitarnya.

Sedangkan Zona Otorita meliputi 400 hektar yang terletak di Hutan Produksi Nggorang-Bowosie Kabupaten Manggarai Barat, dimana paling sedikit 136 hektar akan diberikan Hak Pengelolaannya kepada BOPLBF.

Koordinasi dengan BPIW sangat diperlukan untuk mengetahui program apa saja dari Kementerian PUPR untuk Labuan Bajo dan Flores. Kemudian untuk detil teknis program infrastruktur tersebut Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores dipertemukan BPIW dengan Direktorat Jenderal terkait untuk melakukan koordinasi. Koordinasi dilakukan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tahun 2016, BPIW telah mendukung penyusunan *Masterplan* dan *Development Plan* atau Rencana Induk dan Rencana Pengembangan Labuan Bajo yang berisi rencana aksi terkait pembangunan infrastruktur. Sehingga untuk penyusunan ITMP Labuan Bajo akan lebih mudah karena



Kawasan wisata Batu Cermin Labuan Bajo yang akan ditata Kementerian PUPR.

Sumber: BPIW

tinggal melanjutkan komponen pariwisata, SDM, dan investasi.

Namun karena di Labuan Bajo sudah ada beberapa *masterplan* yang disusun terpisah-pisah, maka sebaiknya ITMP yang disusun BPIW dimulai dengan merangkum dan mereview *masterplan-masterplan* tersebut. Selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian dengan program percepatan ke depan.

Dasar pembahasan ITMP diharapkan bisa mengutamakan *point of view* dari *travel pattern* wisatawan, sehingga ITMP benar-benar mendesain 'experience' wisatawan yang menjadi inti dari ekonomi pariwisata. Selain itu, ITMP yang saat ini sedang disusun, wajib memastikan penerapan pariwisata berkelanjutan. Hal ini khususnya ITMP untuk Labuan Bajo.

Untuk Labuan Bajo dan Flores, secara khusus kami berharap persoalan air bersih bisa selesai tuntas, baik jangka pendek maupun jangka panjang, baik untuk masyarakat maupun wisatawan.

Hal ini akan menjadi awalan yang baik dan komitmen nyata keberpihakan pembangunan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian, membangun nuansa destinasi dengan memperkuat elemen-elemen percampuran budaya yang mewarnai Labuan Bajo dan Flores. Mengedepankan keunikan destinasi misalkan penerapan arsitektur nusantara, penggunaan konsep-konsep kearifan lokal yang tergambar ke dalam bentuk bangunan, jalan, maupun

infrastruktur lainnya sehingga memberikan nuansa khas Labuan Bajo, dengan berbagai latar belakang kekayaan budaya di dalamnya.

Hal yang perlu diperhatikan bersama adalah pelibatan dan pengembangan SDM setempat dalam pembangunan pariwisata. Peningkatan kapasitas SDM untuk memperkuat Atraksi dan Amenitas yang sudah ada, maupun yang akan dibangun. Termasuk penguatan kemitraan strategis dengan Pemerintah Daerah.

Secara umum, memang pelaksanaan kegiatan berbarengan dengan penyusunan rencana, sehingga perlu komunikasi yang intensif. Sejumlah langkah-langkah *quick win* utama perlu kita percepat sesuai arahan Presiden yang harus selesai tahun 2020. Misalkan percepatan penataan kawasan pelabuhan, penataan trotoar, pembangunan *rest area* arsitektur nusantara, penataan Loh Buaya, dan penataan kawasan Batu Cermin. Selain itu, diperlukan dukungan infrastruktur dasar dan akses untuk zona otorita.

Dengan tema wisata premium bahari dan ecotourism, kami berharap BPIW bisa turut serta mengawal implementasi pembangunan pariwisata berwawasan nusantara. Kami bercita-cita Labuan Bajo Flores menjadi kebanggaan Indonesia sebagai model destinasi pariwisata berkelanjutan, dan tentunya tidak akan terwujud tanpa dukungan penuh dari BPIW Kementerian PUPR.





## Infrastruktur Lancar, Promosi Pariwisata Semakin Gencar

**Dadang Rizki Ratman, S.H., M.P.A**

*Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata  
Kementerian Pariwisata*

Pengembangan pariwisata di Indonesia membutuhkan dukungan dari berbagai sektor, terutama infrastruktur sektor PUPR. Bagi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata, Dadang Rizki Ratman, S.H., M.P.A, infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR akan mempermudah wisatawan untuk menuju destinasi wisata dan dapat membantu Kementerian Pariwisata dalam mempromosikan obyek-obyek wisata terutama Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur dapat membantu peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia. Lalu, bagaimana koordinasi selama ini antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian PUPR terutama dengan BPIW? dan apa pandangannya terhadap peran BPIW? Simak hasil wawancara "Buletin Sinergi" berikut ini dengan Dadang Rizki Ratman. Wawancara telah dilakukan di kantor Kementerian Pariwisata beberapa waktu lalu.

### Apa tugas utama Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata?

Tugas utama kita yakni penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata. Sedangkan fokus kita yakni pengembangan destinasi pariwisata yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas atau yang sering disebut dengan 3A.

Atraksi merupakan obyek wisata yang menjadi daya tarik orang untuk datang karena daya tarik alamnya, budaya yang dimiliki suatu kawasan, dan obyek wisata yang dibuat oleh suatu daerah. Komponen lainnya adalah Aksesibilitas yakni terkait konektivitas baik udara, transportasi laut, dan transportasi darat.

Sedangkan komponen terakhir adalah Amenitas yang meliputi prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata. Selain itu, fokus lainnya pada pengembangan investasi pariwisata.

### Apa fokus program yang saat ini dilakukan Bapak dan tim terkait destinasi wisata?

Program yang kita fokuskan adalah pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) atau 10 Bali Baru yang terdiri dari Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu dan Kota Tua, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.

Kemudian berdasarkan rapat terbatas (ratas) pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas pada tanggal 15 Juli 2019, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Lima Destinasi Super Prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

Kementerian Pariwisata memiliki *dashboard* manajemen dan tim percepatan yang membantu pengembangan 10 destinasi prioritas tersebut. Perkembangannya dilaporkan secara rutin kepada Menteri Pariwisata.

*"Kementerian Pariwisata memiliki dashboard manajemen dan tim percepatan yang membantu pengembangan 10 destinasi prioritas tersebut".*





"Kementerian Pariwisata memiliki tiga komponen besar pengembangan pariwisata yaitu destinasi, promosi, dan kelembagaan".

**Apa yang dilakukan terhadap 10 DPP itu?**

Terkait 10 DPP, Kementerian Pariwisata memiliki tiga komponen besar pengembangan pariwisata yaitu destinasi, promosi, dan kelembagaan. Penataan destinasi terbagi dalam 3A tadi. Tentunya pembangunan 3A ini melibatkan lintas Kementerian/ Lembaga. Sebagai contoh, untuk mempermudah akses wisatawan ke destinasi maka diperlukan pembangunan aksesibilitas terutama jaringan jalan menuju destinasi.

Komponen kedua yaitu kelembagaan yang berfokus pada peningkatan SDM pariwisata, masyarakat, dan industri pariwisata. Kesadaran dan kewirausahaan masyarakat terhadap potensi pariwisata ditingkatkan melalui pelatihan dan sertifikasi. Selain itu, industri pariwisata dilakukan standarisasi dan sertifikasi usahanya. Komponen ketiga yaitu promosi yang sering kali disebut dengan BAS,

skala nasional sampai internasional. *Advertising* dilakukan berdasarkan kostumer, produk, atau event. Sedangkan *selling* dilakukan pada kegiatan seperti *travel mart*, *direct sale*, *fetival*, dan sebagainya.

**Peningkatan destinasi wisata dilakukan dengan koordinasi antar Kelembagaan/Lembaga. Koordinasi dalam hal apa yang diperlukan terutama dengan Kementerian PUPR?**

Koordinasi antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Pariwisata tentunya berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas fisik penunjang pariwisata. Misalnya koordinasi untuk pembangunan infrastruktur jalan. Kita berkoordinasi dengan Bina Marga. Terkait penyediaan air baku kita berkoordinasi dengan Sumber Daya Air (SDA). Sedangkan menyangkut infrastruktur yang berhubungan dengan permukiman yakni air minum, sanitasi, dan persampahan, koordinasi dilakukan dengan Cipta Karya. Kemudian untuk penyediaan perumahan/ *homestay*, kita berkoordinasi dengan Penyediaan Perumahan. Namun pada intinya kerja sama dengan Kementerian PUPR terkait aksesibilitas dan amenitas.

**BPIW Kementerian PUPR saat ini tengah mengawal *Integrated Tourism Masterplan* atau ITMP. untuk membantu meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai langkah tersebut?**

Saya jelaskan dulu mengenai Indonesia *Tourism Development Project* (ITDP). Diketahui bahwa ITDP merupakan Program

Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan atau P3TB yang terdiri dari empat komponen utama, yaitu meningkatkan kapasitas



Penenun di Nusa Tenggara Barat menjadi daya tarik wisata

Sumber: Istimewa

kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan. Selain itu meningkatkan akses jalan dan akses pelayanan dasar. Selanjutnya mendorong partisipasi masyarakat dalam sektor ekonomi pariwisata serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi masyarakat dan swasta di bidang pariwisata.

Untuk komponen pertama memiliki *outcome* atau hasil berupa peningkatan kinerja pada indikator "Pariwisata Berkelanjutan" yang diterapkan dalam tiga ITMP dan modul nasional di tiga *Sustainable Tourism Observatory* atau STO. Dari empat komponen penyusunan ITDP/P3TB tersebut diharapkan dapat berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan, peningkatan pengeluaran rata-rata per hari per pengunjung, dan jumlah lapangan kerja baru yang terkait langsung sektor pariwisata di tiga lokasi ITMP.

Dari segi substansi, konten ITMP ini difokuskan pada *visioning*, *projection*, *policy scenarios* dan *action plan*. Saya menekankan ITMP ini pada masalah *visioning*, dimana KSPN telah memiliki

*visioning* masing-masing, sebagai contoh Borobudur sebagai *World Cultural Masterpiece*. Penyusunan ITMP yang dilakukan BPIW tentu saja akan membantu dalam strategi peningkatan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

**Koordinasi seperti apa yang dilakukan Kementerian Pariwisata dengan BPIW selama ini?**

Koordinasi perencanaan dan lokus pembangunan destinasi pariwisata terutama infrastruktur. Kita juga melakukan koordinasi terkait penyusunan ITMP. Berdasarkan Kepmen PPN/ Bappenas No.KEP.9/M. PPN/HK/01/2019 dibentuk Tim Koordinasi Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan. Khusus ITMP ini selain dengan BPIW dari Kementerian PUPR, kita melakukan koordinasi lintas Kementerian/ Lembaga lainnya yakni Kementerian Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN/ Bappenas), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan skema *loan* Bank Dunia.

Saya menekankan ITMP ini pada masalah *visioning*, dimana KSPN telah memiliki *visioning* masing-masing."



*branding*, *advertising*, dan *selling*. Memperkenalkan *branding Wonderful Indonesia* atau *Pesona Indonesia* pada



"BPIW telah berperan dalam menyusun program pembangunan infrastruktur PUPR dalam mendukung pengembangan pariwisata nasional"



Sumber: BPIW

**Bagaimana Bapak melihat peran BPIW dalam merencanakan dan memprogramkan dukungan infrastruktur sektor PUPR untuk peningkatan pariwisata nasional?**

BPIW telah berperan dalam menyusun program pembangunan infrastruktur PUPR dalam mendukung pengembangan pariwisata nasional. Langkah BPIW dalam mendukung pengembangan pariwisata salah satunya dengan melakukan penyusunan ITMP.

Selain itu saya salut dengan adanya konsep Anjungan Cerdas yang kini anjungan itu sudah berdiri di Trenggalek Jawa Timur dan Jembrana Bali. Bahkan sudah siap untuk dimanfaatkan. Anjungan Cerdas itu bagus, karena masyarakat yang berkunjung ke situ mendapat hiburan dan produk-produk masyarakat sekitar dapat dipasarkan.

**Apa harapan Bapak terhadap BPIW kedepan?**

Saya sangat berharap BPIW sebagai badan yang konsern terhadap pengembangan wilayah dapat mengarahkan pembangunan infrastruktur terutama dari segi pemanfaatan infrastruktur yang ada di sekitar kawasan wisata. Sehingga infrastruktur yang telah dibangun benar-benar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. **(Hendra/Ajeng)**



Judul Buku :  
**Utak-Atik Tata Kelola Kota**  
Penulis :  
**Tjuk Kuswartojo**  
Penerbit :  
**ITB Press**  
Tahun Terbit : 2019  
Jumlah Halaman: 176 halaman

*“Penulis menjelaskan bahwa filosofi “berkelanjutan” adalah bukan tentang fisiknya, melainkan mengenai kualitas dan kuantitasnya.”*

## Utak-Atik Tata Kelola Kota

Buku ini ditulis oleh Tjuk Kuswartojo, seorang pecinta ilmu yang berlatar belakang arsitek. Beliau adalah dosen di Jurusan Arsitektur ITB, namun sangat konsen dengan masalah lingkungan. Beliau mendirikan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup ITB dan menjadi peneliti di sini hingga tahun 2001. Selain itu, beliau juga sering mengikuti kursus mengenai lingkungan di beberapa negara.

Buku ini dimulai dengan mencoba mencari makna kota bagi orang Indonesia. Karena di Indonesia sendiri ada banyak sebutan kota dari berbagai bahasa daerah. Dalam Bahasa Inggris yang mafhum di kalangan orang Indonesia pun, kota memiliki dua sebutan, yaitu *town* dan *city*. Sementara istilah *City* di Indonesia lebih mengarah ke suatu varian pada bisnis properti, jadi tidak ada makna yang sesuai dan mendalam. Padahal dalam makna aslinya, *town* dan *city* menunjukkan satuan mukiman berdasarkan tingkat kemandiriannya.

Bab selanjutnya menelaah mengenai dinamika perkotaan, mulai dari pertumbuhan penduduknya hingga beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika kota. Pembahasan dilanjutkan dengan tema “Kota Berkelanjutan”. Penulis menjelaskan bahwa filosofi “berkelanjutan” adalah bukan tentang fisiknya, melainkan mengenai kualitas dan kuantitasnya. Di bagian ini dibahas beberapa hal terkait komponen yang mendukung kota berkelanjutan, misalnya masalah ekologi, daya dukung dan daya tampung, energi, hingga isu hidrologi.

Kemudian penulis melanjutkan dengan bahasan mengenai tantangan penyelenggaraan kota. Di bab ini dibahas bagaimana penduduk yang padat dibarengi gaya hidup modern dan produk-produk globalisasi yang begitu marak semuanya membawa dampak pada tata kelola kota. Penulis kemudian menawarkan kerangka manajemen kota dengan beberapa instrument pengelolaan kota, yaitu perencanaan, tindak, dinamika kota, pemantauan, dan evaluasi.

Pembahasan dilanjutkan dengan pengelolaan kota dan kaitannya dengan hak asasi manusia. Bagian ini agaknya ditulis ketika Indonesia sedang dalam peralihan menuju negara hukum yang lebih desentralistik, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, kesan atas situasi kota yang diungkapkan masih diliputi gambaran tentang pelanggaran HAM.

Setelah menggambarkan ketimpangan desa dan kota, buku ini kemudian menukil RPJPN 2005-2025 yang menandai respons pemerintah atas perkembangan perkotaan. Kemudian, bahasan diakhiri dengan menjelaskan agenda PBB tentang tata kelola kota yang tertuang dalam dokumen *New Urban Agenda (NUA)* dan komitmen pemerintah Indonesia termasuk melalui Kementerian PUPR untuk turut mengimplementasikannya. **(Mutri)**



Rencana Pembangunan  
Infrastruktur Terpadu

# TANJUNG LESUNG “HOLIDAY RESORT”



Pariwisata termasuk ke dalam strategi Pemerintah Republik Indonesia periode 2015-2019 dalam meningkatkan perekonomian nasional, di samping sebagai penggerak perekonomian juga diharapkan meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pembangunan sektor pariwisata tentunya tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur pendukungnya, termasuk infrastruktur PUPR.

Ketersediaan infrastruktur PUPR yang efektif dan handal memiliki peranan penting bagi pengembangan kawasan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur tidak hanya dititikberatkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah, tetapi perlu bersinergi dengan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah yang akan dikembangkan.

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Ripparnas). Dari 88 KSPN di dalam peraturan tersebut, 10 diantaranya merupakan KSPN prioritas yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Salah satunya adalah KSPN Tanjung Lesung yang juga memiliki status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sektor pariwisata sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Adapun KSPN Tanjung Lesung termasuk melingkupi KPPN Carita dan Taman Nasional Ujung Kulon.

KSPN Tanjung Lesung- Ujung Kulon merupakan bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional Ujung Kulon Krakatau dan sekitarnya, serta terintegrasi dengan KSPN Krakatau, KPPN Carita dsk, Pantai Barat Serang-Cilegon, Serang Banten Lama, serta wisata ziarah Banten Lama.

Dari area tersebut, fokus pemrograman berada pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Lesung-Ujung Kulon. Meski demikian, kawasan pemrograman tidak hanya terbatas pada area KSPN, melainkan juga meliputi regional *support*-nya.

Pemrograman untuk *regional support* meliputi konektivitas antara KSPN Tanjung Lesung-Ujung Kulon dengan Perkotaan Panimbang dan Labuan, serta Kawasan Rencana Bandara Banten.



Pintu gerbang wisata Tanjung Lesung

Sumber: Shutterstock



## Delineasi Kawasan Fokus Pemrograman dan Regional Support



KSPN Tanjung Lesung-Ujung Kulon berada di kawasan barat Pulau Jawa sehingga memiliki potensi kunjungan wisatawan dari besar di wilayah kota-kota sekitarnya seperti Bandung, Surabaya, Lampung, Singapura dan Malaysia. Kota-kota besar ini cukup potensial mendatangkan wisatawan ke KSPN Tanjung Lesung - Ujung Kulon dskt.



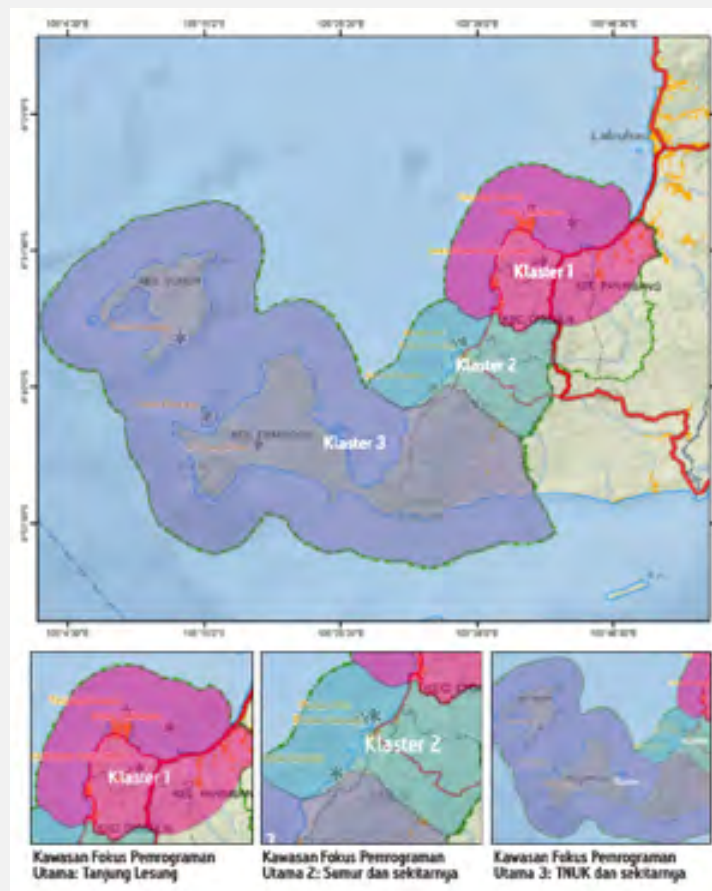
## POSISI KAWASAN PARIWISATA TANJUNG LESUNG TERHADAP WPS

Peran KSPN Tanjung Lesung dalam pengembangan WPS ini adalah sebagai salah satu titik perkembangan wilayah yang berbasis pada kepariwisataan yang diharapkan dapat menjadi titik pertumbuhan utama yang memberikan dampak positif pada wilayah sekitarnya. Keberadaan KSPN Tanjung Lesung di kawasan WPS pusat baru (sedang berkembang) ini dapat memberikan potensi bangkitan pertumbuhan ekonomi dan *trickle down effect* dari kegiatan pariwisata. Hal ini dikarenakan kawasan Cilacap, Pangandaran dan Sukabumi juga memiliki potensi yang sama dalam bidang ekonomi pariwisata.

Bidang ekonomi pariwisata ini telah sesuai dengan arahan *ultimate* WPS 9 yaitu: Potensi pariwisata di kawasan pesisir pantai WPS 9 khususnya dapat dikembangkan sebagai wisata alam. Target kunjungan wisata di 2025 diharapkan dapat menyerap 1 juta pengunjung Wisatawan mancanegara dan tiga juta pengunjung Wisatawan domestik; dan adanya Kawasan Perhotelan di Tanjung Lesung akan memicu berkembangnya industri kreatif berbasis masyarakat. Serta dipertimbangkan untuk membangun suatu kawasan inkubasi di Tanjung Lesung. Pada hakikatnya, pembangunan infrastruktur melalui

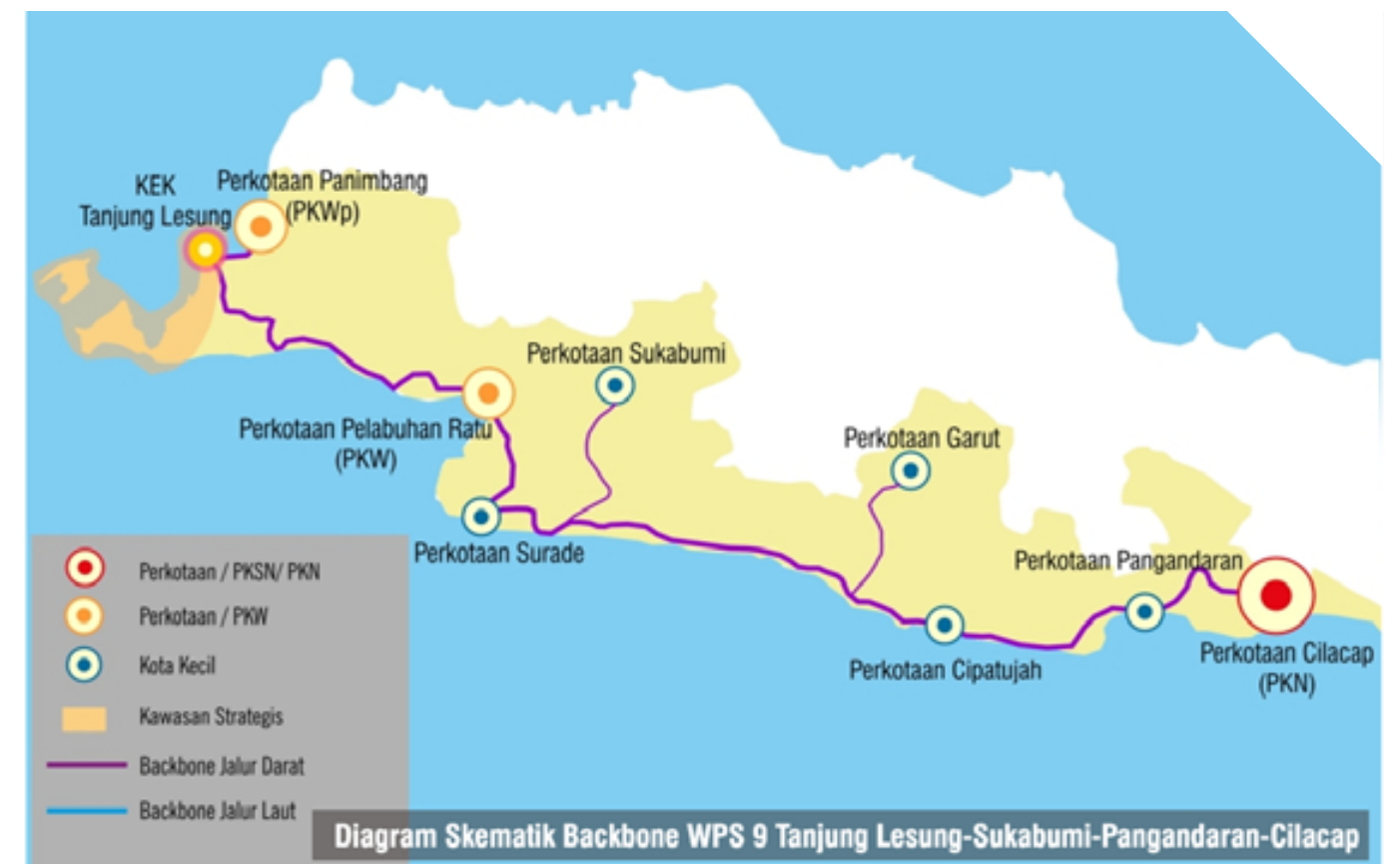
pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) merupakan upaya untuk mengurangi ketimpangan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, KSPN Tanjung Lesung juga berperan sebagai penyeimbang pertumbuhan bagi wilayah sebelah barat WPS 9. Melalui dukungan KEK Pariwisata Tanjung Lesung, KSPN Tanjung Lesung akan berperan sebagai pusat industri jasa pariwisata berdaya saing internasional dan industri kreatif penopang kawasan wisata.

Posisi KSPN Tanjung Lesung dalam WPS 9 adalah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi dengan orientasi daya saing nasional dan internasional berbasis ekonomi kreatif, serta sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia. Keberadaan KSPN Tanjung Lesung-Ujung Kulon dskt ini juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian bagi Kabupaten Pandeglang yang masuk kedalam daerah tertinggal di Kabupaten Banten melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang memiliki daya saing dan menciptakan *added value*.



KSPN ini merupakan bagian dari WPS 9 atau Wilayah Pusat Pertumbuhan baru yang terdiri dari koridor Tanjung Lesung – Sukabumi – Pangandaran – Cilacap. Pusat Pertumbuhan baru memiliki arti bahwa saat ini *backbone* perekonomian koridor tersebut belum berkembang dan belum berfungsi secara maksimal, untuk itu perlu didorong perkembangan kawasan dan penguatan konektivitas untuk mempercepat kemajuan.

Berdasarkan pada kondisi sektor perekonomian koridor WPS 9 dengan panjang koridor 638 KM, terdapat beberapa pusat-pusat kegiatan seperti Perkotaan Cilacap sebagai PKN dengan sektor industri dan energi, perkotaan Pangandaran dengan basis ekonomi perikanan, pariwisata dan industri pengolahan, perkotaan Garut dengan basis ekonomi pertanian dan industri pengolahan serta perkotaan Sukabumi dengan basis ekonomi perikanan, pertanian dan industri pengolahan.





# ULTIMATE GOAL KAWASAN WISATA TANJUNG LESUNG

## Destinasi Kawasan Wisata Berbasis Resor

*Ultimate* adalah kondisi kawasan yang ingin dituju melalui pemograman infrastruktur berbasis pendekatan wilayah dalam jangka waktu 10 tahun. Untuk menyusun *ultimate* kawasan pariwisata pantai tidak dimulai dari nol, tetapi berangkat dari berbagai visi pembangunan pariwisata maupun daerah yang sudah pernah disusun dan/atau ditetapkan. Untuk kawasan Tanjung Lesung, setidaknya ada beberapa pernyataan visi yang sudah pernah dikemukakan, yaitu antara lain:

### Visi Kementerian Pariwisata:

Dalam rencana induk top 10 destinasi nasional, Visi yang dikembangkan adalah Tanjung Lesung *Gateway to Adventure in West Edge of Java*

### Visi Pemerintah Provinsi:

Terwujudnya Tujuan Pariwisata dan Kebudayaan yang Berkembang dan Lestasi

### Visi Pemerintah Kabupaten:

Pandeglang sebagai Pusat Pariwisata Banten yang Maju, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan



Sebagai salah satu kawasan yang dikembangkan dalam kerangka WPS 9 Tanjung Lesung-Sukabumi-Pangandaran-Cilacap, maka *ultimate* kawasan ini seyogyanya selaras dengan *ultimate* WPS 9 itu sendiri. *Ultimate* WPS 9 adalah pusat industri dan jasa pariwisata berdaya saing internasional dan industri kreatif penopang kawasan wisata.

Sehingga dengan dukungan kebijakan pengembangan pariwisata nasional sebagai KSPN, adanya kebijakan ekonomi sebagai KEK, dan sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas nasional, maka kawasan Tanjung Lesung seharusnya memiliki *ultimate* yang menekankan pada pengembangan sektor pariwisata.

Berdasarkan konsep *ultimate* yang disusun, Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung akan mengandalkan keberadaan rencana Bandara Panimbang beserta Kawasan Perkotaan Panimbang sebagai *regional Hub* utama. Dalam hal ini, pembangunan bandara sangat penting untuk segera direalisasikan agar layanan

aksesibilitas menuju Tanjung Lesung lebih memadai, sehingga dapat memenuhi target wisatawan yang diinginkan pada tahun 2019 dan bahkan hingga 2026. Selain itu, rencana jalan tol Serang-Panimbang juga menjadi kunci penting. Kunci pengembangan kawasan pariwisata adalah konektivitas antara Hub utama dengan klaster DTW, konektivitas antarklaster DTW, serta konektivitas di dalam DTW yang menghubungkan titik-titik daya tarik utama dan pendukung.

Oleh karena itu, *hub regional* utama Rencana Bandara dan juga kawasan perkotaan Panimbang ini harus terhubung secara langsung dengan DTW-DTW utama, yakni pada klaster Tanjung Lesung (KEK) serta kawasan sumur yang ke depannya perlu dikembangkan juga sebagai DTW utama dan pusat pelayanan amenities. Konektivitas utama yang dibangun ini harus memadai, baik dari segi kondisi fisik (kualitas, kuantitas), maupun ketersediaan moda yang melayaninya

Sementara itu, antarklaster juga perlu terkoneksi satu sama lain melalui sistem konektivitas darat, baik dalam konteks jaringan maupun pelayanan moda khusus pariwisata. Kunci penciptaan nilai kawasan pariwisata lainnya adalah peningkatan atraksi dan penciptaan nilai di klaster-klaster DTW. Penciptaan nilai ini dilakukan dengan meningkatkan amenities di dalam klaster yang

melayani titik-titik daya tarik utama dan pendukung, meningkatkan atraksi atau produk wisata di dalam klaster serta titik-titik daya tariknya, serta meningkatkan akses yang baik antara pusat pelayanan amenities dengan titik-titik daya tarik, baik melalui penciptaan jaringan yang baik maupun penyediaan moda transportasi yang kontinyu dan memadai. (Alis/Farhan)

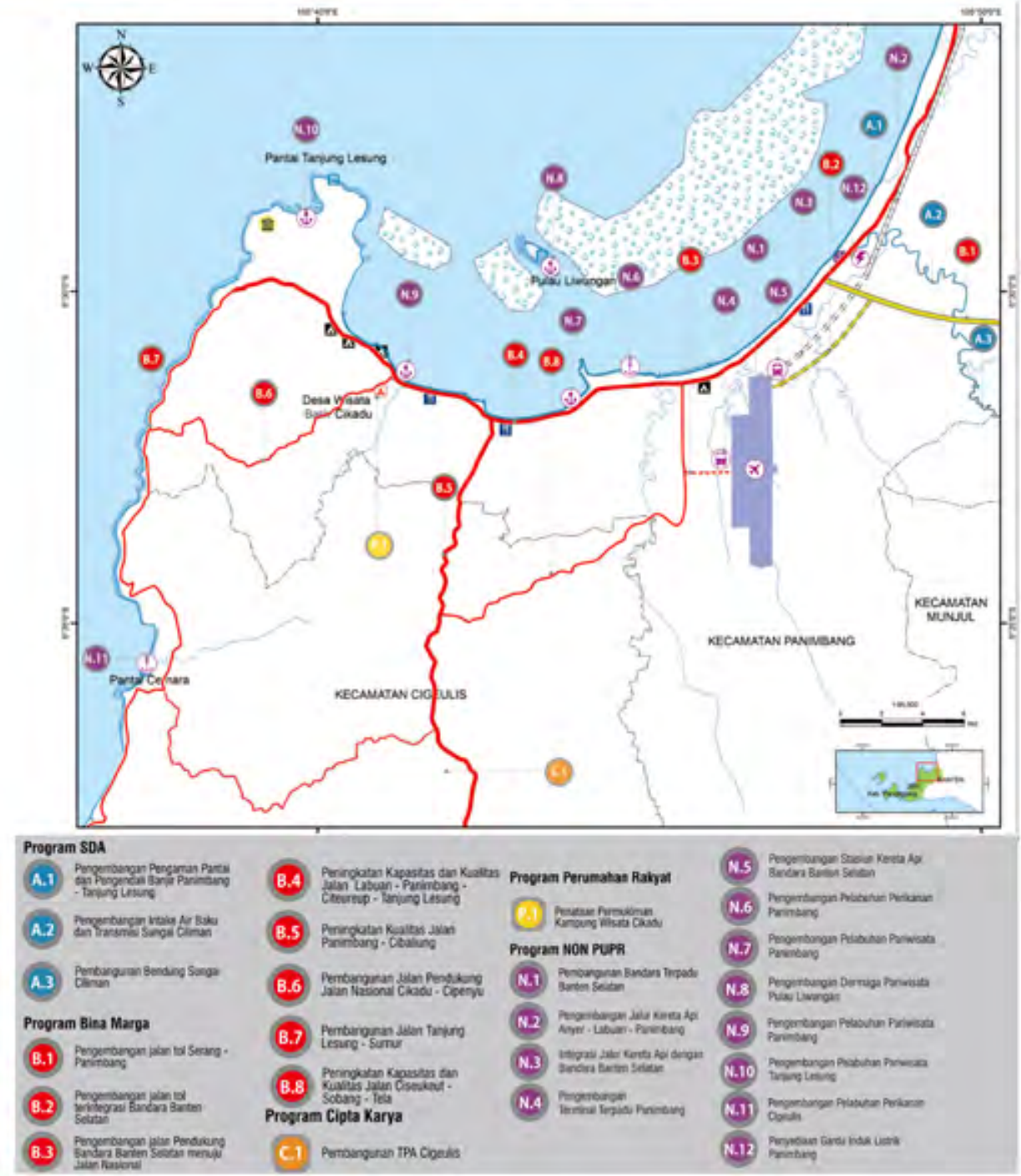
## Strategi Pengembangan Kawasan





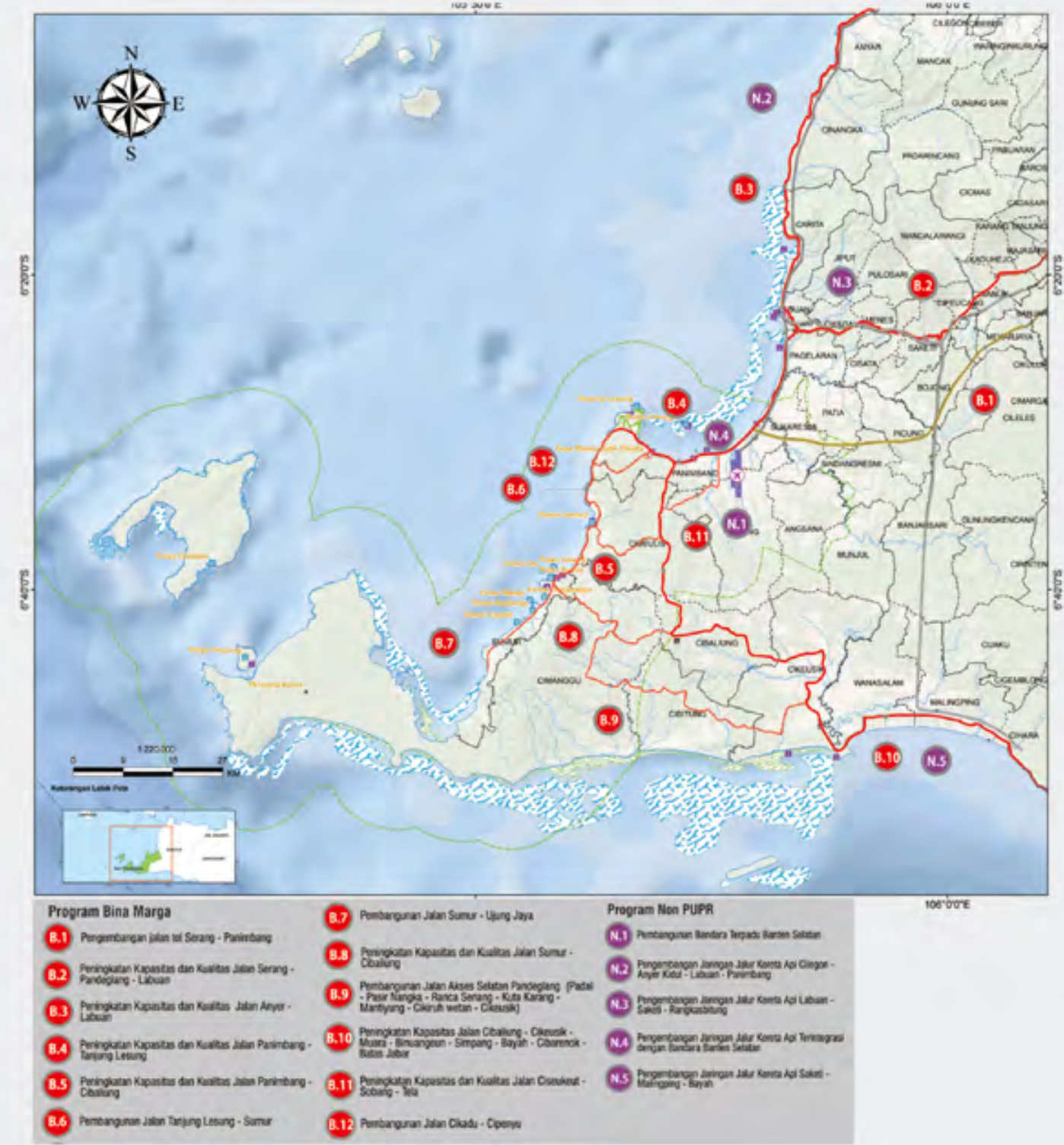
# RENCANA STRATEGIS INFRASTRUKTUR ANTAR DESTINASI 1

## Penataan Koridor Pariwisata Panimbang - Tanjung Lesung



# RENCANA STRATEGIS INFRASTRUKTUR

## Peningkatan Aksesibilitas (Regional Support) Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung





# Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

Kami mengumpulkan guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengan Kementerian PUPR. Guntingan berita tersebut kami sarikan dari empat media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu, dapat berguna sebagai media monitoring BPIW. Berikut ini potongan pemberitaan terpilih pada bulan Juni-Juli.

Kliping berita BPIW dapat di download di: [bpiw.pu.go.id/publication/scrapbook](http://bpiw.pu.go.id/publication/scrapbook)

## Kawasan Industri Kendal & Gresik Dapat Dukungan

**Bisnis, JAKARTA-** Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan berbagai upaya untuk mendukung infrastruktur kawasan industri, khususnya Kendal dan Gresik.

Pengembangan infrastruktur diarahkan untuk mendukung Visium Indonesia 2045, yaitu memajukan sektor industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, mendukung destinasi unggulan pariwisata, dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mengatakan bahwa dukungan infrastruktur diberikan untuk wilayah kawasan industri Kendal (Jawa Tengah) dan Gresik (Jawa Timur).

“Program 2019 yang sedang berjalan di luar kawasan industri Kendal adalah preservasi jalan Weleri-Kendal-Semarang, pembangunan penyediaan air baku Kabupaten Kendal Jawa Tengah,” ujarnya kepada *Bisnis*, Rabu (18/6).

Apabila diperinci, untuk program 2020, hasil dari konsultasi regional yang telah yang telah diselenggarakan BPIW ada beberapa program arahan untuk daerah Kendal seperti pelebaran empat lajur jalan baru akses Pelabuhan Kendal dan pembangunan jalan akses Pelabuhan Penyeberangan Kendal, pembangunan tempat pembuangan akhir Darupono Baru.

Sementara itu, pelaksanaan Program Infrastruktur PUPR 2019 Kawasan Industri Kendal untuk sektor Bina Marga terutama terkait dengan jalan nasional Metropolitan Semarang, sedangkan untuk sektor Cipta Karya program yang dilakukan adalah pembangunan infrastruktur permukiman Kab. Kendal.

Untuk sektor Sumber Daya Air yakni pengendalian banjir Sungai Blorong dan untuk sektor Penyediaan Perumahan, salah satu programnya yakni pembangunan rumah susun sederhana sewa untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Hadi menjelaskan bahwa untuk program dukungan infrastruktur PUPR di luar kawasan industri Gresik yang tengah berjalan seperti preservasi rekonstruksi jalan Surabaya-Gresik-Sadang.

Bila dilihat dari per sektor, katanya, maka pelaksanaan Program Infrastruktur PUPR 2019 untuk JIPE diantaranya preservasi rekonstruksi jalan Surabaya-Gresik-Sadang (rekonstruksi jalan) untuk sektor Bina Marga.

Untuk sektor Cipta Karya yakni Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Mojolamong Pengembangan Jaringan Distribusi Utama Kab. Lamongan. **(Krizia P.Kinanti)**



Teropong Media edisi 40 ini mengulas berita yang berjudul “Kawasan Industri Kendal & Gresik Dapat Dukungan di Harian Bisnis Indonesia pada 20 Juni 2019 di halaman 7. Berikut ulasannya :

### Dukungan Infrastruktur PUPR Untuk 17 Kawasan Industri Prioritas

Dalam berita itu disebutkan bahwa Kementerian PUPR melakukan berbagai upaya untuk mendukung pembangunan infrastruktur terutama di Kawasan Industri (KI) Kendal dan Gresik. Dalam Visium Indonesia 2045, salah satunya juga disebutkan soal memajukan sektor industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.

Pada dasarnya dukungan Kementerian PUPR untuk 17 Kawasan Industri (KI) prioritas 2015-2019. Ketujuh belas KI tersebut Kuala Tanjung, Sei Mangkei, Tanggamus, Landak, Ketapang, Batulicin, Bitung, Palu, Morowali, Konawe, Bantaeng, Buli, Bintuni, Sayung, Kendal, KI *Java Integrated Industrial and Port Estate* (JIPE) Gresik, dan KI Jorong. Kemudian, KI yang termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yakni Sei Mangkei, Bitung, dan Palu.

Dalam suatu kesempatan, Kepala BPIW Hadi Sucahyono menjelaskan bahwa Kementerian PUPR tidak membangun infrastruktur didalam KI dan KEK, tapi kawasan diluarnya. Jadi bila Kementerian PUPR memperbaiki permukiman, air baku, dan jalan akses menuju ke KI dan KEK, maka yang dilayani adalah masyarakat

sekitarnya. Dipastikan bahwa Kementerian PUPR akan memberikan dukungan infrastruktur, bila pihak pengelola KI dan KEK membangun kawasan tersebut.

Beberapa kawasan sudah dilakukan pembangunan oleh pihak pengelola seperti KEK Mandalika, Lombok, yang dibangun oleh Indonesia *Tourism Development Corporation* (ITDC). Kawasan yang juga menjadi bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) ini tengah dibangun beberapa sarana seperti hotel berbintang.

Dengan dibangunnya kawasan tersebut oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu, maka Kementerian PUPR dapat memberikan dukungan berupa penataan kawasan kumuh, jalan kampung diperbaiki, serta penataan kampung nelayan.

Bila program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) mempunyai empat kawasan super prioritas, maka KI dan KEK tidak memiliki kawasan yang diprioritaskan untuk dikembangkan. Oleh karenanya BPIW membuat program di seluruh KI dan KEK di Indonesia.

Pada prinsipnya pengembangan KEK dan KI dititik beratkan pada pengelolaan yang dilakukan pihak swasta maupun BUMN. Sedangkan Kementerian PUPR melayani masyarakat berpenghasilan rendah yang ada di dua kawasan tersebut. Pengembangan kedua kawasan tersebut memerlukan kerja sama antara Pemerintah dan pihak swasta. Dengan dukungan infrastruktur sektor PUPR di sekitar KI, diharapkan dapat membantu perekonomian di kawasan tersebut. **(Hendra)**



# Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

Kami mengumpulkan guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengan Kementerian PUPR. Guntingan berita tersebut kami sarikan dari empat media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu, dapat berguna sebagai media monitoring BPIW. Berikut ini potongan pemberitaan terpilih pada bulan Juni-Juli.

Kliping berita BPIW dapat di download di: [bpiw.pu.go.id/publication/scrapbook](http://bpiw.pu.go.id/publication/scrapbook)

## Jembatan Batam Bintang

### Studi Lokasi Kelar Tahun ini

Bisnis, JAKARTA-Rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan senilai Rp 4 triliun terus berjalan. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menargetkan studi kelayakan lokasi jembatan terpanjang di Indonesia itu bisa rampung tahun ini. Studi akan menentukan aspek manfaat dari keberadaan jembatan, baik di sisi Batam maupun di sisi Bintang.

Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan, pihaknya sudah melakukan survei landing point atau calon lokasi kaki jembatan di sisi Batam dan di sisi Bintang, mencakup sisi Kabil, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang, dan Tanjung Uban. Dia menambahkan, survei dan kajian harus dilakukan secara komprehensif mengingat lokasi pembangunan berada di wilayah kepulauan.

“Kami buat studi kelayakan lokasi da menghitung seberapa besar manfaatnya. Ini nanti menjadi rekomendasi ke (Ditjen) Bina Marga yang akan melakukan studi engineering-nya,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (18/7).

Hadi mengimbuhkan, studi yang dibuat BPIW juga diharapkan memberi rekomendasi yang kondusif bagi konservasi lingkungan, baik yang ada di Batam maupun Bintang. Dia menggambarkan, pihaknya tidak akan merekomendasikan trase jembatan melewati kawasan bakau atau mangrove.

Di samping itu, studi juga mencakup dampak keberadaan jembatan terhadap kegiatan ekonomi lainnya seperti angkutan penyeberangan. Walaupun demikian, secara umum Jembatan Batam-Bintan diharapkan bisa membuka peluang pengembangan kegiatan wisata di Kepulauan Riau.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, studi pembangunan

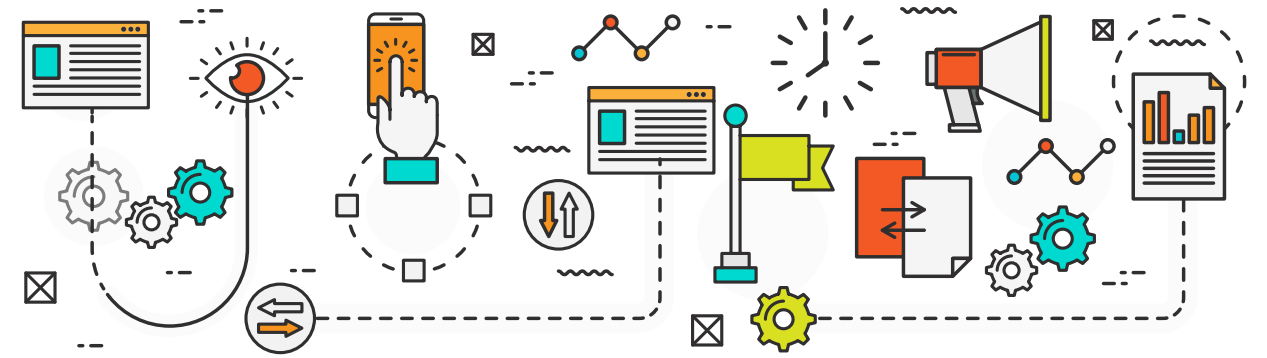
Jembatan Batam-Bintan bakal rampung tahun ini sehingga pembangunan bisa dimulai pada 2020. Proyek ini mendapat perhatian khusus karena masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2020-2024.

Basuki menuturkan, biaya pembangunan jembatan diperkirakan mencapai Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun. Namun, dia menekankan biaya pembangunan akan tergantung pada hasil desain yang saat ini disusun. Kementerian PUPR membuka peluang partisipasi badan usaha dalam pembangunan Jembatan Batam Bintang.

Partisipasi tersebut bisa dalam bentuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Namun, skema pembiayaan itu akan tergantung pada hasil studi. Dia menggambarkan, bila pembiayaan sebagian atau seluruhnya dari swasta, kemungkinan akan diterapkan tol atau tarif. “Kalau menggunakan APBN tidak bertarif. Jadi bisa jalan tol, bisa saja tidak. Tergantung studi”.

Sementara itu Ketua DPRD Kepulauan Riau Jumaga Nadeak meminta Plt Gubernur Isdianto mengawal rencana strategis pembangunan Jembatan Batam Bintang setelah terjadinya operasi tangkap tangan KPK terhadap Gubernur, Nurdin Basirun atau kasus suap dana reklamaasi.

Jumaga optimis kasus yang menimpa Nurdin itu tidak akan mempengaruhi pembangunan jembatan tersebut. “Jembatan Babin itu dibiayai APBN sekaligus janji Pak Jokowi. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan kasus Pak Nurdin,” kata Jumaga seperti dikutip melalui Antara.



Teropong Media edisi 40 ini mengulas berita yang berjudul “Jembatan Batam Bintang, Studi Lokasi Kelar Tahun ini” yang ditampilkan Harian Bisnis Indonesia pada 1 Juli 2019. Berikut ulasannya :

### Jembatan Batam Bintang, Akan Jadi Daya Tarik Wisata

Pada berita itu diinformasikan bahwa studi kelayakan lokasi jembatan terpanjang di Indonesia itu akan rampung tahun ini. Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan, pihaknya sudah melakukan survei landing point atau calon lokasi kaki jembatan di sisi Batam dan di sisi Bintang, mencakup sisi Kabil, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang, dan Tanjung Uban.

Program pembangunan jembatan ini sudah disebut di dalam peraturan pemerintah berupa Peraturan Presiden, RPJMN 2020 - 2024, dan Rencana Tata Ruang (RTR Pulau Sumatera sehingga termasuk program yang memerlukan perhatian khusus.

Oleh karenanya BPIW melakukan kajian, seperti kajian secara teknis terkait aspek geologi dan disain teknis jembatan. Selain itu juga dikaji terkait aspek nilai tambah dan manfaat pembangunan Jembatan.

Survei dan kajian mengenai rencana pembangunan jembatan ini memang harus dilakukan mengingat karakteristik wilayah yang berbentuk kepulauan. Pembangunan jembatan juga harus memperhitungkan evaluasi pembangunan jembatan-jembatan penghubung pulau lainnya dalam memajukan

salah satu wilayahnya. Dengan demikian perhitungan yang dibuat lebih komprehensif.

Di sisi lain, pembangunan Jembatan Batam Bintang ini diharapkan dapat semakin membuka peluang pengembangan kegiatan wisata yang bertumpu pada keindahan alam, sehingga dimensi daya dukung lingkungan termasuk penataan kawasan permukiman nelayan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. (Hendra)





## Fungsi BPIW Penting untuk Direvitalisasi

Sumber: Dok. PUPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) secara intens tengah menyusun regulasi berupa Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Pedoman Penyusunan Rencana, Program dan Penganggaran Infrastruktur. Penyusunan Rapermen yang ditargetkan rampung pada Maret 2020 mendatang ini, diinisiasi berawal dari harapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pentingnya revitalisasi fungsi BPIW dalam mengimplemantasikan *masterplan* atau rencana induk. Bahkan, KPK menilai *masterplan* yang disusun BPIW harus menjadi acuan setiap unit organisasi (Unor) teknis di lingkungan Kementerian PUPR dalam melakukan perencanaan.

| RENCANA PENYUSUNAN DAN LEGALISASI PEDOMAN PERENCANAAN DAN PEMOGRAMAN INFRASTRUKTUR PUPR  |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |      |   |   |  |  |
|--|--|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|------|---|---|--|--|
| Adanya regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak terkait dalam proses perencanaan dan pemrograman yang lebih jelas dan transparan |  | INDIKATOR OUTPUT<br>Tersusunnya Pedoman Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur Di Lingkungan Kementerian PUPR |   |   |   | BUKTI<br>Peraturan Menteri/ Surat Edaran yang telah disahkan |   |   | TARGET SELESAI<br>Draft: Oktober 2019<br>Final : Maret 2020 |   |   |      |   |   |  |  |
| NO   | DESKRIPSI KEGIATAN   | 2019   |   |   |   |  |   |   |   |   |   | 2020 |   |   |  |  |
|  |  | M  | A | M | J | J  | A | S | O   | N | D | J    | F | M |  |  |
| 1  | Penetapan kerangka kerja rumusan rencana, program dan pembiayaan |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |      |   |   |  |  |
| 2  | Penyusunan naskah akademis                                       |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |      |   |   |  |  |
| 3  | Pembahasan draft struktur Rapermen di Lingkungan BPIW            |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |      |   |   |  |  |
| 4  | Pembahasan draft Rapermen dengan Unor di lingkungan PUPR         |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |      |   |   |  |  |
| 5  | Pembahasan draft Rapermen dengan Biro Hukum                      |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |      |   |   |  |  |
| 6  | Legalisasi draft Rapermen  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |      |   |   |  |  |

Berawal dari upaya melakukan pencegahan tindak korupsi di lingkungan Kementerian PUPR, Divisi Pencegahan KPK melakukan kajian. Hasil kajian lembaga antirasuah itu menunjukkan bahwa perlu adanya revitalisasi fungsi BPIW dalam menegakkan *masterplan*. Selain itu, diperlukan juga penyusunan regulasi untuk mengatur kepatuhan perencanaan yang mendukung *masterplan*.

Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman H Napitupulu mengakui, BPIW menyusun regulasi untuk mengintegrasikan dalam suatu proses perencanaan dan pemrograman.

Untuk tujuan regulasi tersebut tertuang dalam Rapermen yang saat ini terus dimatangkan. Setelah Peraturan Menteri (Permen) ini berlaku diharapkan proses perencanaan dan pemrograman di lingkungan Kementerian PUPR dapat berjalan pada kondisi yang ideal.

“Adanya Rapermen ini, maka nanti akan ada peraturan yang jelas dalam perencanaan setiap Unor,” terangnya. Peraturan tersebut sekaligus

turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Termasuk juga, turunan peraturan lainnya seperti undang-undang terkait tata ruang yang menjadi rujukan dari Rapermen tersebut.

Beberapa hal yang dituangkan dalam Rapermen ini diantaranya mekanisme perencanaan infrastruktur PUPR dan dasar perencanaan yang harus berbasis kewilayahan. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menyatakan bahwa infrastruktur harus mendukung kawasan ekonomi yang berbasis kewilayahan.

Selanjutnya, proses perencanaan itu dituangkan kedalam proses pemrograman infrastruktur yang direalisasikan oleh sektor Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan. Rapermen ini juga membahas beberapa hal seperti mekanisme pemrograman infrastruktur tahunan, pengaturan penganggarnya dan koordinasi program dengan kementerian/lembaga terkait.

Menteri PUPR telah mengasikan penyusunan Rapermen tersebut kepada BPIW untuk mengintegrasikan dalam suatu proses perencanaan dan pemrograman yang terkendali.



Rapermen ini harus dapat diselesaikan karena sangat terkait dengan struktur organisasi BPIW

“Proses mekanisme kesepakatan mulai dari perencanaan hingga penganggaran harus disebutkan juga dalam Rapermen ini,” tutur Firman. Bila telah disahkan menjadi Peraturan Menteri (Permen), maka akan terlihat sektor mana yang memanfaatkan infrastruktur PUPR, sehingga ada pertanggungjawaban terkait masalah tersebut.

Dengan adanya peraturan itu, maka BPIW punya dasar yang kuat dalam mengintegrasikan pembangunan infrastruktur PUPR, seperti mengintegrasikan program infrastruktur sektor Cipta Karya dan Penyediaan Perumahan. Menurutnya, Rapermen ini harus dapat diselesaikan dengan cepat karena sangat terkait dengan struktur organisasi BPIW. Struktur organisasi harus selesai bulan November mendatang dan ditetapkan

fungsi organisasi BPIW 2020-2024 setelah penetapan Menteri PUPR yang baru. Nantinya disiapkan beberapa instrumen aturan-aturan yakni Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK), studio peta, sistem informasi, dan sumber daya manusianya.

Firman berharap Rapermen yang akan menjadi Permen tersebut dapat membantu unit organisasi (unor) yang menangani perencanaan dan pembangunan infrastruktur PUPR sesuai kewenangannya.

Permen yang tengah dimatangkan tersebut terus mengalami perkembangan. “Isinya diperkirakan akan berisi tujuh bab,” ujar Firman.

Antara lain, Bab I mengenai Ketentuan Umum, Bab II mengenai Perencanaan Pengembangan Infrastruktur PUPR, Bab III mengenai Penyusunan Program



Rapat internal BPIW

Sumber: Dok. BPIW

Tahunan Pengembangan Infrastruktur Kementerian PUPR, Bab IV mengenai Perkiraan dan Skema Pembiayaan Infrastruktur, Bab V mengenai Sistem Informasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah, BAB VI mengenai Pemantauan dan Evaluasi, BAB VII mengenai Ketentuan Penutup.

Saat berkunjung ke Kantor BPIW, Perwakilan Divisi Pencegahan KPK, Niken Ariati menjelaskan, KPK ingin melakukan koordinasi mengenai pencegahan praktek-praktek korupsi. KPK juga ingin ada pertukaran informasi perencanaan agar dapat mengidentifikasi akar masalah pada pembangunan infrastruktur.

Selain itu, Peneliti Litbang KPK, Elih Dalilah memaparkan, KPK telah melakukan kajian sistem penyelenggaraan jalan nasional.

Menurutnya, tipologi korupsi pada sistem jalan nasional meliputi empat tahap, yakni perencanaan umum, perencanaan teknis, pra konstruksi dan konstruksi, kemudian konstruksi dan pasca konstruksi.

Selain revitalisasi, Kementerian PUPR perlu menyusun Permen tentang ketentuan lebih lanjut mengenai tata

cara dan persyaratan pekerjaan PU di luar lingkup kewenangan Kementerian PUPR.

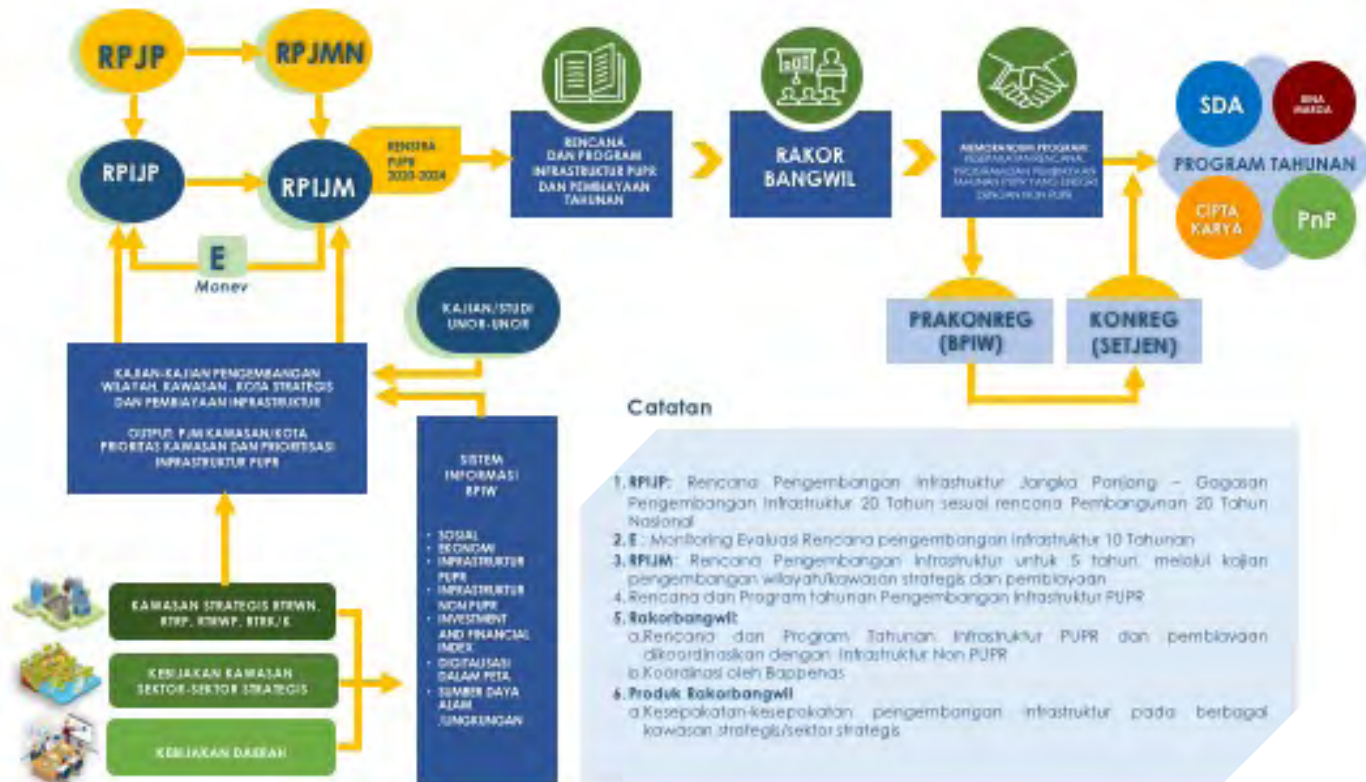
“Seperti pemberian bantuan pembiayaan kepada pemerintah daerah, direktif, usulan legislatif dan lainnya,” katanya.

Kemudian, Kementerian PUPR juga dianggap perlu menyusun sistem pencatatan usulan mulai dari direktif presiden atau usulan legislatif. Selain itu, perlu juga menyusun manajemen perubahan pada sistem perencanaan anggaran agar terintegrasi dan transparan.

“Baik aturan tata laksana pembagian peran dalam perencanaan dan perubahannya,” ungkapnya. Tidak hanya itu, Kementerian PUPR juga perlu penyusunan sistem *database* terpusat mengenai kondisi jalan yang terintegrasi dengan perencanaan dan aset. **(Redaksi)**

KPK juga ingin ada pertukaran informasi perencanaan agar dapat mengidentifikasi akar masalah pada pembangunan infrastruktur.

### PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM/PENGANGGARAN INFRASTRUKTUR WILAYAH







**Binsar H. Simanjuntak**  
Staf Khusus Menteri PUPR

## Memiliki Fungsi Strategis, BPIW Perlu Regulasi

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki fungsi yang strategis dalam pengelolaan organisasi Kementerian PUPR. Fungsi yang dimiliki BPIW akan banyak mempengaruhi efektivitas dalam pengembangan infrastruktur dan wilayah di Indonesia.

Fungsi strategis itu antara lain penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur di bidang PUPR.

Pelaksanaan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR. Termasuk, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR serta pelaksanaan administrasi BPIW.

Untuk mewujudkan optimalisasi kinerja fungsi BPIW yang strategis, regulasi yang mengaturnya dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen). Substansi yang perlu dalam Permen itu antara lain, fungsi mengintegrasikan proses perencanaan dan pemrograman di lingkungan Kementerian PUPR.

Adanya aturan guna mendorong penguatan Sistem Informasi Pemrograman (SIPro) untuk mendukung proses perencanaan dan pemrograman. Termasuk, penguatan mekanisme Konsultasi Regional (Konreg) dan hasil Konreg serta penajaman program hasil Konreg.

Dalam hal ini program yang dihasilkan BPIW itu berupa masterplan atau garis besarnya. Untuk program detailnya ditindaklanjuti oleh Unor teknis di lingkungan Kementerian PUPR. Untuk menguatkan *masterplan* produk BPIW, seluruh pejabat eselon I atau user di lingkungan Kementerian PUPR perlu melakukan persetujuan terhadap *masterplan* yang telah disusun.

Kemudian, agar produk BPIW dapat benar-benar dimanfaatkan oleh unor teknis perlu adanya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tata kelola organisasi BPIW.

Diharapkan BPIW akan semakin kuat dan memiliki produk yang berkualitas yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh unor teknis sebagai user BPIW dalam pengembangan infrastruktur di seantero negeri.

Rubrik ini memuat rangkuman artikel ilmiah bidang pengembangan wilayah dan yang berkaitan. Artikel yang diulas dalam rubrik ini adalah yang telah terbit dalam jurnal ilmiah nasional/ internasional. Untuk mendapatkan artikel asli, pembaca dapat menghubungi redaksi.

## Peran Perencanaan Ruang untuk Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Model Teoritis Turki

**Okan Murat Dede, dan Asin Mustafa Ayten**  
(Amasya University, Faculty of Architecture Department of City and Regional Planning, Amasya, Turkey)

Perencanaan ruang dan sektor pariwisata sekilas nampak seperti dua konsep yang terpisah, padahal sebenarnya sangat berkaitan. Pertama, kegiatan pariwisata berlangsung di suatu kawasan tertentu, sehingga memiliki karakter spasial. Kedua, pariwisata adalah sektor penghasil pendapatan utama bagi banyak negara termasuk Turki. Perencanaan ruang adalah alat untuk mengatur kegiatan pariwisata dan memfasilitasi integrasi pariwisata dengan sektor-sektor lain.

Konsep “berkelanjutan” kemudian membawa perspektif baru ke perencanaan ruang dan pariwisata. Konsep pariwisata berkelanjutan muncul setelah tahun 1980-an dengan dinamika dan hubungan sektoralnya sendiri. Keberlanjutan dan perencanaan ruang bertemu pada tingkat filosofis karena perencanaan ruang adalah

tindakan mengatur kehidupan masyarakat masa depan tentang bagaimana penggunaan lahan dan desain hubungan sosial-ekonomi. Perencanaan yang terfragmentasi atau parsial tidak memadai untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan. Perencanaan komprehensif adalah hal penting karena ini adalah konsep luas yang mencakup semua masalah lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya.

### Pariwisata dan Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata menjadi industri global dalam rentang waktu 60 tahun dan tren ini tampaknya akan terus berlanjut (UNWTO, 2009). Peningkatan interaksi budaya dan ekonomi antar negara menjadi hal yang penting.

Kegiatan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam dan budaya di sekitarnya.



“Lingkungan” dan “budaya” adalah pusat pengembangan pariwisata. Ada hubungan timbal balik antara pariwisata dan lingkungan. Pariwisata memengaruhi lingkungan seperti halnya lingkungan dan faktor-faktor lain memengaruhi pariwisata.



Tempat-tempat wisata di Turki (sumber: turkeytourcompany.com)

Misalnya, fasilitas pariwisata yang padat menyebabkan degradasi lingkungan yang pada gilirannya menyebabkan penurunan daya tarik pariwisata.

Keberlanjutan elemen lingkungan dan budaya sangat penting untuk mempertahankan kegiatan pariwisata di suatu destinasi. Namun, lingkungan semakin terancam, dengan masalah lingkungan global yang memburuk selama 30 hingga 40 tahun terakhir dan masalah pembangunan berkelanjutan telah dibahas secara internasional, secara umum maupun dalam pariwisata.

Pada tingkat global, wacana lingkungan ini muncul pada Konferensi Stockholm 1972, Laporan Brundtland 1987, dan Konferensi Rio 1992 yang menjadi salah satu dokumen keberlanjutan internasional yang paling terkenal dari PBB.

Sementara itu, dokumen tentang masalah lingkungan adalah Deklarasi Manila untuk Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO)

yang disetujui pada 1980. Pada tahun 1996, dokumen terkait; “Agenda 21 untuk Industri Perjalanan dan Pariwisata: Menuju Pembangunan Berkelanjutan yang Ramah Lingkungan” diterbitkan. Selain itu masih banyak lagi dokumen terakit ini yang terbit pada tahun-tahun setelahnya.

Pergerakan dan wacana global tersebut membawa kemajuan signifikan dalam mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan. Bentuk-bentuk alternatif pariwisata perlahan-lahan berubah dari dominasi pariwisata massal. Hal ini sangat jelas dalam ekologi atau ekowisata yang sering dipertimbangkan sebagai bentuk terbaik dari pariwisata berkelanjutan.

Kekhawatiran global lainnya untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah terkait dengan wilayah pesisir. Mereka berada di bawah ancaman karena tekanan dari peningkatan populasi, pertumbuhan daerah perkotaan dan perluasan area industri.

#### Peran Perencanaan Tata Ruang Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Peran penting tata ruang dalam proses pencapaian ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan terbukti dalam banyak dokumen dan kebijakan resmi. Tentang hal ini juga digarisbawahi oleh PBB (2008, hal. 1) di mana dinyatakan bahwa: “Perencanaan tata ruang mencapai tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan dengan memberi masyarakat manfaat dari pembangunan dan dengan mempromosikan penggunaan tanah dan sumber daya alam secara bijaksana untuk pembangunan”

Meskipun semua negara memiliki sistem perencanaan khusus, secara umum, perencanaan tata ruang dapat dibagi menjadi kategori perencanaan nasional dan transnasional, perencanaan regional, dan perencanaan kota. Desain arsitektur kompleks atau bangunan unik dapat

dimasukkan dalam kategori perencanaan tata ruang ini. Tingkat nasional dan regional lebih terkait dengan tingkat kebijakan sedangkan perencanaan kota dan desain perkotaan lebih terkait dengan masalah ruang dan ruang dalam pengembangan tujuan wisata.

Perencanaan ruang adalah langkah paling penting dalam proses pengembangan pariwisata berkelanjutan. Perencanaan ruang memiliki manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam Pengembangan pariwisata, manfaat ekonomi tata ruang dapat dilihat dari bagaimana kualitas lingkungan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk investasi sambil berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Manfaat sosial dari tata ruang, misalnya dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal, mendukung penyediaan infrastruktur lokal, mempertahankan lingkungan yang sehat dan aman.

Sedangkan manfaat lingkungan misalnya untuk mempromosikan regenerasi dan penggunaan tanah dan bangunan yang tepat, melestarikan aset alam, sejarah dan budaya, melindungi struktur alam, mendorong penghematan energi dan efisiensi energi (PBB, 2008, hal. 2). Perencanaan ruang juga dianggap sebagai mekanisme penyangga antara sektor swasta dan publik untuk menjangkau semua pemangku kepentingan.

#### Sistem Perencanaan Turki Saat Ini dan Pengaruhnya Terhadap Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Ada empat tahap utama dalam sistem perencanaan Turki: Strategi Nasional dan Rencana Pembangunan, Rencana Regional, Rencana Tata Lingkungan, dan Rencana Konstruksi dan Pengembangan wilayah. Rencana nasional yang sebagian besar rencana strategis mengenai kebijakan dan rencana aksi berada pada puncak hierarki.

Rencana regional dibuat dalam skala lebih dari 1 /100.000 dan biasanya bersifat tidak pasti. Rencana Tata Lingkungan menentukan kondisi keputusan penggunaan lahan dengan mempertimbangkan perumahan, industri, pertanian, pariwisata dan transportasi yang terkait dengan kebijakan nasional dan

regional. Rencana Tata Lingkungan diterapkan dalam batas provinsi dan disiapkan dalam skala 1 /50.000 dan 1 /100.000 tergantung pada peraturan. Rencana Konstruksi dan Pengembangan Wilayah dibagi menjadi rencana Master (Nazim) yang sesuai dengan skala 1 /25.000 dan 1 /5.000 dan rencana aplikasi konstruksi untuk skala 1 /1.000.

Berikut ini adalah beberapa hambatan perencanaan Turki, yang seharusnya dirubah, antara lain:

- Kurangnya sistem perencanaan ruang yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional
- Kurangnya visi dan strategi perencanaan koperasi
- Implementasi parsial dalam perencanaan dan berbagai konflik antara keputusan otoritas publik yang berbeda
- Banyak pihak berwenang untuk skala spasial yang sama
- Kurangnya koordinasi antar lembaga

#### Model Perencanaan Tata Ruang yang Diusulkan untuk Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Turki

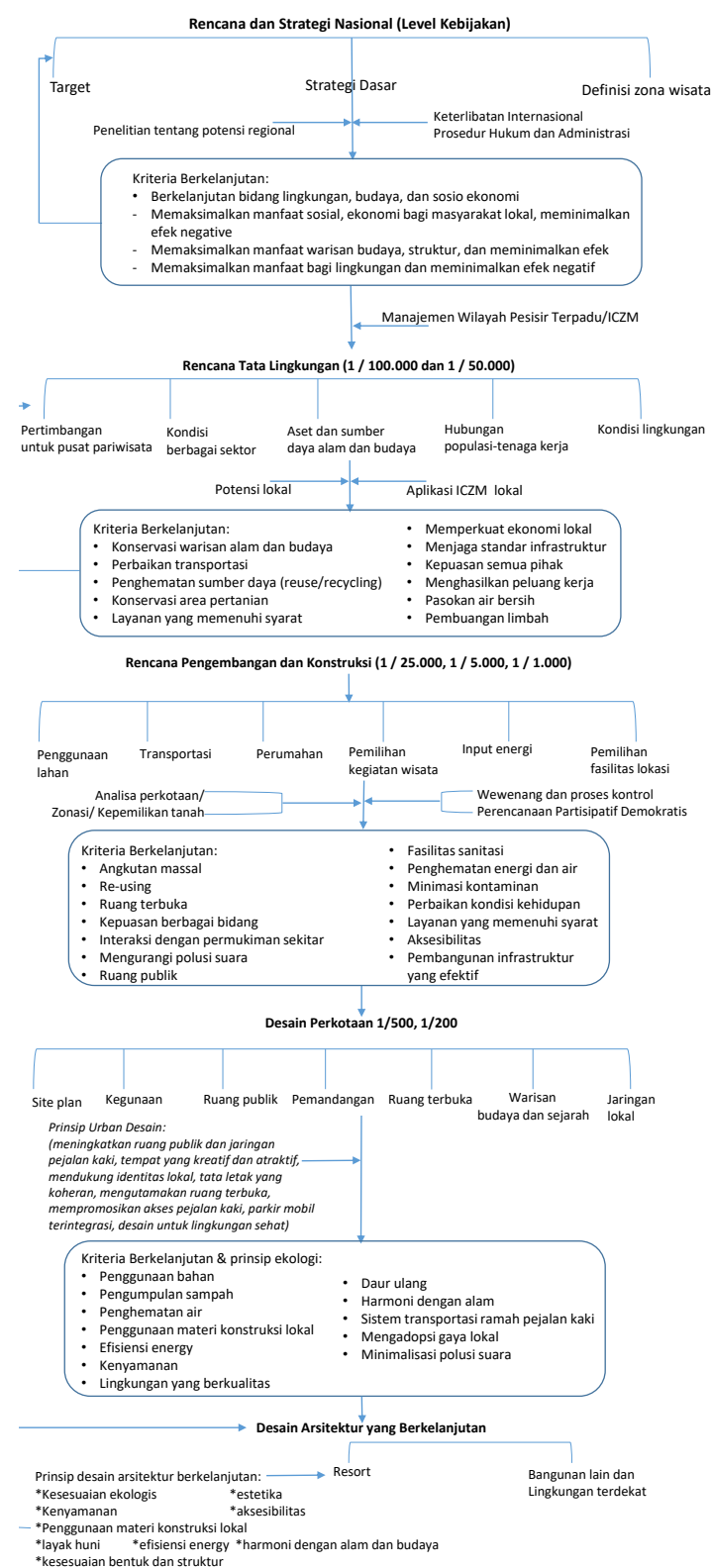
Dalam paper ini diusulkan model baru tata ruang yang bertujuan untuk mendukung usaha pengembangan pariwisata berkelanjutan. Model yang diusulkan terdiri dari dua bagian penting, yaitu bagan operasi dan aspek kelembagaan dan aspek hukum yang mendukung proses perencanaan.

Sistem perencanaan Turki menggunakan pendekatan *top-down*. Pendekatan *top down* penting untuk memastikan keberlanjutan karena menawarkan pendekatan yang holistik untuk solusi masalah dalam konteks pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Struktur dari model ini bergantung pada umpan balik kriteria “berkelanjutan” di setiap tingkat perencanaan. Level pertama sebagian besar terkait dengan kebijakan, strategi dan keputusan nasional dan perjanjian internasional yang relevan dengan sektor pariwisata. Tingkat ini adalah level kebijakan, bukan perencanaan fisik.



### Usulan Perencanaan Tata Ruang untuk Model Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan untuk Turki



Original scientific paper  
Okun Murat Dede / Asim Mustafa Ayten  
Vol. 60/ No. 4/ 2012/ 431- 445

| Tahapan rencana/tindakan   | Pembuatan Keputusan                    | Perencanaan                     | Eksekusi                               | Supervisi  | Monitoring  |
|----------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|
| Rencana Nasional           | Pemerintah pusat                       | Pemerintah pusat                | Pemerintah pusat/<br>Pemerintah Daerah | Semua pihak kecuali perwakilan daerah                          | Semua pihak                                       |
| Rencana tata Lingkungan    | Pemerintah pusat/<br>Pemerintah Daerah | Pemerintah Daerah               | Pemerintah Daerah                      | Semua pihak  | Semua pihak                                       |
| Rencana pengembangan lokal | Pemerintah Daerah                      | Pemerintah Daerah               | Pemerintah Daerah                      | Pemerintah daerah, LSM terkait, universitas, perwakilan daerah | Semua pihak                                       |
| Desain Perkotaan           | Pemerintah daerah/<br>pengusaha        | Pemerintah daerah/<br>pengusaha | Pemerintah daerah/<br>pengusaha        | Pemerintah daerah, LSM terkait, universitas, perwakilan daerah | Pemerintah daerah, LSM terkait, perwakilan daerah |
| Arsitektur                 | Pengusaha                              | Pengusaha                       | Pengusaha                              | Pemerintah daerah, universitas                                 | Pemerintah daerah, LSM terkait, perwakilan daerah |

Tabel: Peran para pemangku kepentingan dalam model perencanaan ruang yang diusulkan untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di Turki

Rencana Tata Lingkungan di tingkat regional dan sub-regional merupakan jantung dari tahap kedua. Tahap ini memediasi antara tingkat kebijakan dan tingkat perencanaan tata ruang lokal.

Tahap ketiga sepenuhnya terkait dengan perencanaan kota. Rencana pengembangan dan konstruksi dianggap sebagai rencana kota. Skala peta yang digunakan pada level ini adalah 1/5.000 dan 1/1.000. Keputusan pada tahap ini terdiri dari penggunaan lahan, transportasi, perumahan, pemilihan kegiatan wisata, input energi dan pilihan lokasi untuk fasilitas wisata.

Faktor-faktor seperti analisis perkotaan, zonasi, dan pola penguasaan lahan mendukung proses pengambilan keputusan pada tahap ini. Tahap keempat terdiri dari Desain Perkotaan dengan fokus pada 'Rencana Lokasi'. Beberapa yang penting pada tahap ini antara lain adalah keputusan tentang lanskap, warisan budaya, ruang publik dan desain transportasi lokal.

Tahap terakhir terdiri dari tahap desain arsitektur resor atau bangunan lain dan lingkungan sekitarnya. Tujuan pada tahap ini adalah menghasilkan solusi arsitektur yang sesuai dan kompatibel dengan kemungkinan dan potensi dari berbagai daerah yang melestarikan kearifan lokal dan memenuhi kriteria untuk penggunaan prinsip-prinsip keberlanjutan.

#### Kesimpulan

Konsep pembangunan berkelanjutan semakin menarik perhatian dari sektor pariwisata serta banyak sektor lain seperti pertanian, transportasi dan industri.

Perdebatan tentang "Berkelanjutan" menunjukkan bahwa pariwisata adalah sektor yang sangat penting yang tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar khususnya di Turki. Sektor ini harus diatur dan direncanakan untuk kepentingan semua pelaku yang terlibat dalam pariwisata. Perencanaan ruang adalah hal penting bagi pariwisata.





Peta Turki (Sumber: [www.tourmakerturkey.com](http://www.tourmakerturkey.com))

Sistem perencanaan yang koheren dan hati-hati harus dibuat untuk mengendalikan proses pembangunan berkelanjutan dan menghindari kerusakan sistem. Proses ini melampaui analisis sisi permintaan dan penawaran dan harus disusun secara hierarkis mulai dari strategi nasional hingga desain arsitekturnya.

Kegiatan pariwisata berlangsung di daerah / ruang tertentu. Ia memiliki karakter spasial yang kuat dan karenanya semuanya tahap perencanaan penting untuk pengembangannya. Dalam proses ini, perencanaan ruang adalah salah satu alat paling penting untuk mempertahankan pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Karena keberlanjutan adalah masalah yang kompleks dan memiliki berbagai faktor (ekonomi-sosial-budaya-lingkungan), agak sulit untuk memastikan keberlanjutan tanpa pendekatan perencanaan tata ruang yang benar dan koheren.

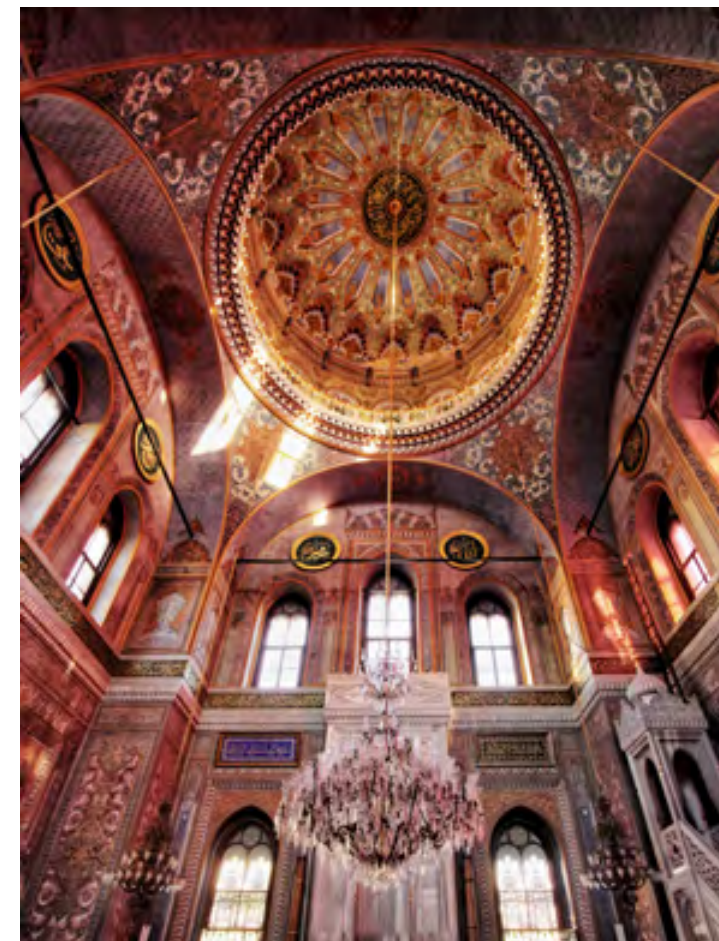
Setiap negara memiliki sistem perencanaan yang berbeda. Sistem perencanaan ini memiliki tingkat pengaruh yang ber-

beda terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan tergantung pada beberapa faktor seperti tingkat partisipasi, kekuatan dan tingkat penegakan dan tingkat hierarkis.

Permodelan dan proses perencanaan ruang tidak hanya menjadi tugas perencana kota atau arsitek karena keberhasilan rencana tergantung pada keterlibatan berbagai profesional (ahli ekonomi, ahli geografi, sosiolog, ahli geologi, perancang lanskap, insinyur sipil dll).

Partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan seperti pemerintah, lembaga-lembaga sipil, pemerintah daerah serta penduduk setempat. Pada akhirnya, pemantauan dan evaluasi semua tahap perencanaan sangat penting untuk keberhasilan sebuah rencana.

(Dirangkum dan diterjemahkan oleh: Mutri Batul Aini)



Interior Masjid Pertevniyal Valide Sultan



Masjid Pertevniyal Valide Sultan

Sumber: [unsplash.com](https://unsplash.com)



Cappadocia, Turki

Sumber: [unsplash.com](https://unsplash.com)



# Pengembangan Kawasan Aerotropolis NYIA Kulon Progo Sebagai Moda Pendukung ITMP



Disampaikan oleh  
**Stephanus Raden Kristianto, ST, M.Eng, Sc, Med**

Analisis Perencana Pengembangan Perkotaan  
Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Baru dan Kota Besar

Dalam perkembangan saat ini bandara merupakan salah satu moda yang berperan sangat penting selain sarana dan prasarana jalan raya, hal tersebut pasti mempertimbangkan unsur jarak dan waktu tempuh mencapai suatu tempat tujuan. Perencanaan teknis secara khusus pada pengembangan wilayah telah mempertimbangkan hal tersebut sebagai unsur penting sebagai salah satu moda dan konektivitas antar wilayah sehingga daerah disekitarnya dapat saling memberikan kontribusi positif *sebagai trigger of engine growth*.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan berusaha melakukan pengembangan tematik **Aerotropolis Yogyakarta International Airport (D.I. Yogyakarta)** sebagai **upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah** dan memberikan dukungan dalam mempercepat pengembangan tematik Kota Bandara (*Aerotropolis*) yang mandiri, terpadu, cerdas dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 tentang Pembangunan 15 Bandara Baru dalam hal perencanaan Infrastruktur PUPR yang terpadu dan berkelanjutan.

Ke limabelas bandara baru tersebut adalah Bandara Letung Anambas,

Bandara Namniwel Buru, Bandara Morowali Sulawesi Selatan, Bandara Miangas Sulawesi Utara, Bandara Maratua Kalimantan Timur, Bandara Werur Papua Barat, Bandara Koroway Batu Papua, Bandara Kertajati Majalengka, Bandara Tebelian Kalimantan Barat, Bandara Samarinda Baru Kalimantan Timur, Bandara PAntar Alor, Bandara Muara Teweh Barito Utara, Bandara Siau Kepulauan Siau, Bandara Tambelan Riau dan Bandara Buntu Kunik Toraja.

Bandara sebagai suatu titik dalam peta diharapkan dapat mengakomodir mengenai pergerakan baik orang dan barang atau logistik hingga hal-hal berupa data dan informasi serta layanan publik

## KEDUDUKAN AEROCITY & AEROTROPOLIS TERHADAP AIRPORT

AIRPORT CITY merupakan inti dari terbentuknya Aerotropolis, sebuah kota mandiri baru yang berkembang di sekitar bandar udara-bandar udara besar.



yang bersifat umum maupun tertentu secara optimal dan efisien seiring dengan semakin terintegrasinya perekonomian global yang dinamis dapat memberikan dampak perkembangan teknologi, sarana prasarana infrastruktur dan perkembangan ekonomi wilayah salah satunya adalah potensi pariwisata.

Saat ini Indonesia telah melakukan manuver meningkatkan daya saing wilayah dengan memanfaatkan konektivitas melalui jalur udara dengan pembangunan infrastruktur bandara serta dukungan infrastruktur darat yang memadai antara lain jalan nasional, propinsi, Kabupaten/kota maupun jalan lokal menuju destinasi wisata.

*Airport city* merupakan inti dari terbentuknya Aerotropolis, dimana sebuah kota mandiri baru yang berkembang disekitar bandara udara dapat membentang hingga radius 20 - 30 km dari pusat bandara. Potensi perkembangan tersebutlah sebagai dasar untuk meningkatkan pengembangan wilayah disekitar. Sebagaimana umumnya masyarakat juga akan melihat peluang untuk berusaha memaksimalkan peluang meningkatkan perekonomian

Muncul klaster bisnis baru yang terkait dengan jasa penerbangan, sebagai embrio terbentuknya Aerotropolis (Kasarda, 2016). Kawasan sekitar bandara akan muncul pusat kegiatan lokal dengan komoditi lokal pada awalnya, penginapan dan hotel, kegiatan kerajinan, oleh-oleh, komoditas lokal lain akan bermunculan di sekitar kawasan bandara sehingga perekonomian mikro akan terpacu dengan nilai strategis dampak dari bandara.

Pemerintah daerah pun tidak akan ketinggalan dalam memanfaatkan peluang tersebut dengan destinasi wisata andalan disekitarnya, dengan asumsi bahwa destinasi wisata andalan akan menyerap wisatawan dan restribusi dan pajak dapat meningkatkan anggaran pendapatan asli daerah (PAD) sehingga peran pmda akan mendukung dengan perbaikan, peningkatan serta pembangunan infrastruktur yang memadai.

Banyak sekali potensi wisata yang terpendam maupun yang belum secara maksimal publikasinya terganjal oleh akses dan konektivitas. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai maka potensi-potensi tersebut dapat menjadi andalan destinasi wisata, dalam konteks tulisan ini bandara sebagai salah satu simpul moda dan simpul konektivitas dalam pengembangan wilayah yang mendukung pariwisata dapat dikatakan akan menjadi *economic pointing of engine growth*. Wisatawan akan memilih tujuan pastinya dengan pertimbangan kemudahan akses maupun konektivitas pada tujuan atau lokasi wisata, pertimbangan waktu maupun biaya

yang dikeluarkan oleh para wisatawan akan lebih efisien dan efektif.

Bandar udara ini berdiri di tanah seluas 600 hektar dan diperkirakan menelan biaya Rp. 6 triliun. Bandara memiliki terminal seluas 210.000 meter persegi dengan kapasitas 14 juta penumpang pertahun. Selain itu, bandar udara tersebut diperkirakan bakal memiliki hanggar seluas 371.125 meter persegi yang direncanakan bakal sanggup menampung hingga sebanyak 28 unit pesawat.



Bandara ini juga, bisa menampung pesawat berbadan lebar, seperti B777, B747, A380. Selain itu integrasi moda transportasi lainnya berupa shuttle bus, kereta api, persewaan mobil telah disiapkan sebagai distribusi ke tujuan penumpang dari NYIA.

Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kabupaten Kulon Progo membuka peluang besar pengembangan perekonomian, salah satunya pariwisata disekitarnya karena kawasan di sekitar bandara terdapat banyak sekali destinasi wisata andalan. Konsep pengembangan aerotropolis NYIA Kulon Progo terdapat keterkaitan antar fungsi kegiatan yang direncanakan dengan infrastruktur PUPR antara lain :

1. Perwujudan fungsi Bandara YIA sebagai pintu gerbang serta pusat distribusi perdagangan



\*tulisan ini hanya opini pribadi penulis dan bukan merupakan pernyataan resmi institusi



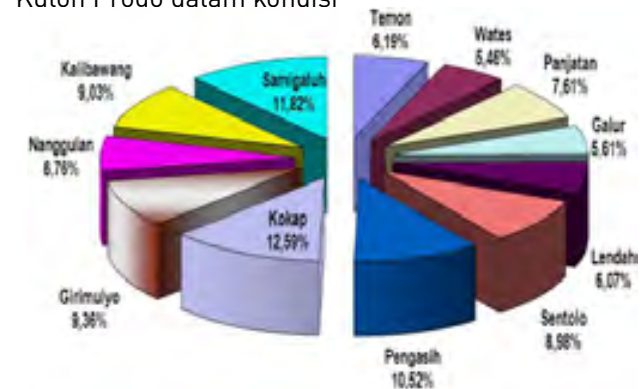
dan jasa skala internasional maupun domestik yang berbasiskan pariwisata dan pertanian.

2. Pemantapan citra kawasan sebagai kawasan "Agro-Aerotropolis"
3. Pengendalian pertumbuhan kawasan permukiman di kawasan LP2B sekitar bandara
4. Pemantapan konektivitas antar Pusat Pelayanan Kawasan di Timur-Barat serta di utara Bandara dengan menyediakan infrastruktur yang baik.

Kabupaten Kulon Progo dengan ibukota di Wates memiliki luas wilayah 58.627,512 ha (586,28 km<sup>2</sup>), berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 425.758 jiwa dengan kepadatan penduduk di Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 mencapai 726 jiwa/km<sup>2</sup>. Wilayah administrasi Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 wilayah Kecamatan. Luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Temon (36,30 km<sup>2</sup>), Wates (32,00 km<sup>2</sup>), Panjatan (44,59 km<sup>2</sup>), Galur (32,91 km<sup>2</sup>), Lendah (35,59 km<sup>2</sup>), Sentolo (52,65 km<sup>2</sup>), Pengasih (61,66 km<sup>2</sup>), Kokap (73,80 km<sup>2</sup>), Girimulyo (54,90 km<sup>2</sup>), Nanggulan (39,61 km<sup>2</sup>), Kalibawang (52,96 km<sup>2</sup>), dan Samigaluh (69,29 km<sup>2</sup>).

Panjang jalan di Kabupaten Kulon Progo menurut jalan kabupaten sepanjang 636,025 km. Sebagian besar jalan di Kulon Progo sudah diaspal.

Menurut kondisinya, jalan kabupaten di Kabupaten Kulon Progo dalam kondisi



- Baik, sepanjang 312,910 km atau 49,20 persen;
  - Sedang, sepanjang 138,815 km atau 21,83 persen;
  - Rusak, sepanjang 100,460 km atau 15,80 persen;
  - Rusak Berat, sepanjang 83,840 km atau 13,18 persen.
- Jumlah pengunjung selama tahun 2018 yaitu 877.561 pengunjung. Nilai PDRB kabupaten Kulon Progo atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2018 mencapai 10,318 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,26 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai

9,06 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

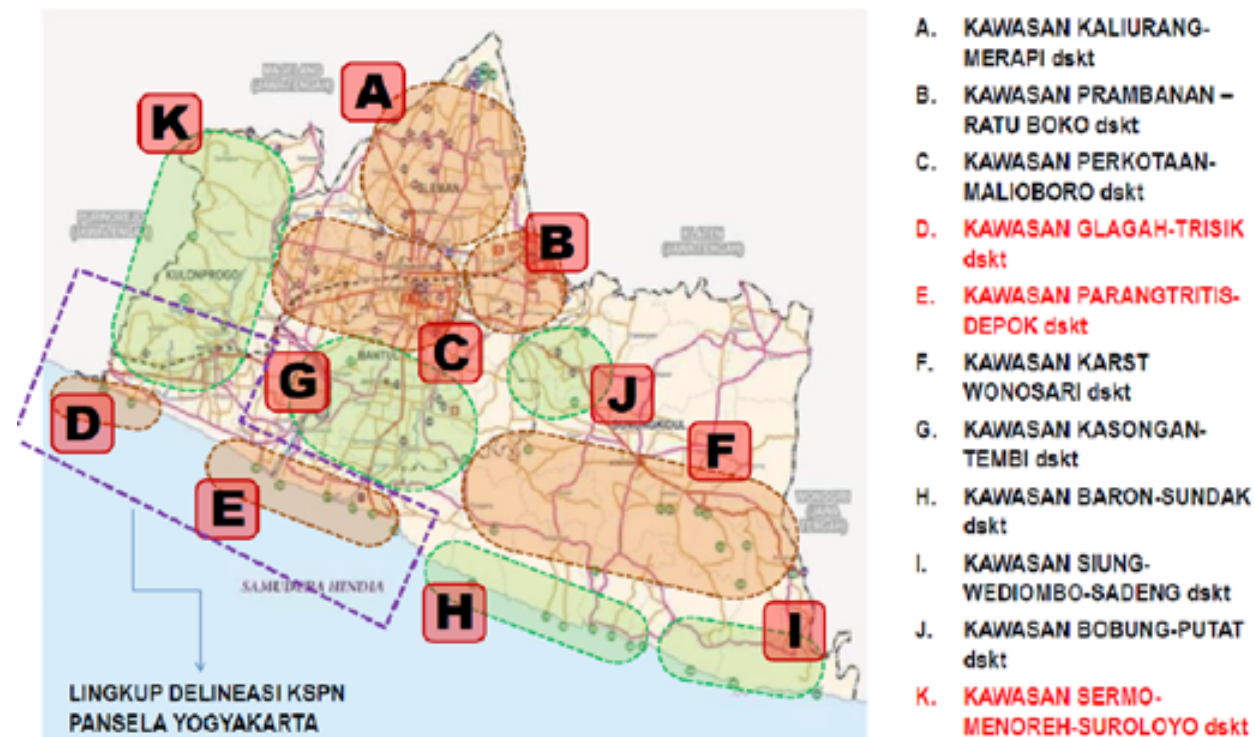
Berdasarkan data kependudukan, luas wilayah serta dukungan infrastruktur jalan, potensi wisata di Kabupaten Kulon Progo dapat menyerap lebih banyak wisatawan dikarenakan kemudahan akses dan konektivitas. Kemudahan tersebut saat ini bila dikemas dengan sebaik mungkin potensi wisata memang menjanjikan sebagai primadona. Sebagai contoh, sebelumnya para wisatawan yang ingin menuju ke Kawasan wisata Gunung Merapi akan mempertimbangkan waktu perjalanan darat menggunakan kendaraan pribadi/ umum, kereta api yang membutuhkan waktu semalam dan dilanjutkan ke tujuan wisata dengan perhitungan waktu serta akomodasi tentunya.

Namun saat ini wisatawan dapat dengan mudah menuju lokasi wisata dengan dukungan akses dan konektivitas serta ragam moda transportasi sehingga cukup menghemat waktu dan pengeluaran akomodasi tanpa mengurangi kepuasan dalam berwisata.

Kepariwisataan didasari dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan terdapat keterkaitan pada sektor infrastruktur PUPR pada pilar pertama mengenai destinasi wisata yakni "Pembangunan daya Tarik wisata, pembangunan prasarana, pembangunan fasilitas umum, pembangunan fasilitas pariwisata serta pemberdayaan masyarakat terpadu dan berkesinambungan". Prasarana infrastruktur ke



KSPN PANSELA MERUPAKAN BAGIAN DARI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DIY SESUAI PERDA DIY NO 1 TAHUN 2012 TENTANG RIPPARDA



PUPR-an merupakan faktor yang sangat penting untuk mewujudkan amanat dari undang undang kepariwisataan. Dengan terbangunnya Bandara NYIA sebagai pemenuhan salah satu akses udara maka diperlukan sinergitas dengan moda transportasi lainnya sehingga dapat mendukung dan mengembangkan KSPN Pantai Selatan (Pansela) DIY dan sekitarnya.

Secara geografis lokasi bandara berada di sekitar 7 KSPN yaitu KSPN Borobudur-Mendut-Pawon, KSPN Dieng, KSPN Kota Yogyakarta, KSPN Karst Gunung Kidul, KSPN Merapi-Merbabu, dan KSPN Prambanan sehingga perencanaan aerotropolis erat hubungannya dengan pengembangan KSPN disekitar bandara NYIA.

Visi KSPN Pansela D.I. Yogyakarta dan sekitarnya yaitu dengan mewujudkan wilayah sebagai destinasi *culture-ecobeach*, berkelas dunia dan berkelanjutan tahun 2025. Sedangkan misinya mengembangkan KSPN pansela dan sekitarnya destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik berdasarkan keunggulan produk wisata yang berkelanjutan (berbasis *ecobeach tourism dan culture*) serta mendorong percepatan pembangunannya.

Namun perlu perhatian khusus dalam perencanaan pengembangan destinasi wisata terkait dengan infrastruktur PUPR tersebut antara lain :

1. Masih terbatasnya konektivitas/ transportasi menuju sebaran wisata beserta akomodasi yang memadai

2. Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas fasilitas wisata dalam prasarana umum serta fasilitas umum ( fasilitas air minum, sanitasi lingkungan, pengelolaan sampah, hingga penataan kawasan)
3. Diperlukan masterplan pengembangan untuk masing-masing KSPN dengan mempertimbangkan saling terkait, saling berkontribusi dan saling mendukung secara teknis maupun perekonomian.

Sehingga tindak lanjut yang akan memberikan percepatan berupa pengembangan sistem sarana dan prasarana transportasi dan konektivitas yang mendukung kegiatan pengembangan pariwisata untuk pemerataan distribusi wisatawan ke KSPN Pantai Selatan – D.I.Yogyakarta dan sekitarnya.

Dengan demikian percepatan pengembangan dan pembangunan wilayah KSPN Pansela – D.I Yogyakarta secara merata merupakan pekerjaan lintas sektor yang perlu disinergikan hingga pada tahap pelaksanaan, pengawasan hingga pengendalian kawasan agar hasil yang diharapkan sesuai dengan yang telah direncanakan dengan detail teknisnya secara maksimal.





# Kawasan Pariwisata Super Prioritas



**PROGRAM Bina Marga:**

- Pelebaran Jalan Akses Mendut-Tanjung Japuan (2,5 km);
- Pelebaran Jalan Sentolo-Dekso (23 km);
- Preservasi & Pelebaran Jalan Tempel-Pakem-Prambanan (56,96 km);
- Preservasi Pelebaran Jalan Wonosobo-Parakan-Temanggung-Pringsurat-Secang-Magelang-Bts. DIY (4,10 km)

**PROGRAM Cipta Karya:**

- Pembangunan SPAM KSPN Borobudur (MYC);
- Pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur;
- Penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon;
- Penataan Kawasan Wisata Candi Mendut

**PROGRAM Perumahan:**

- Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kab. Magelang (207 unit)

**PROGRAM Sumber Daya Air:**

- Pembangunan Embung di Desa Wanurejo dan Desa Losari

**PROGRAM Bina Marga:**

- Preservasi rehabilitasi/rekonstruksi/pelebaran jalan Pemenang-Bayan-Semalun-Bumbung (128 km)
- Rekonstruksi Jalan Bandara Internasional Lombok-Kuta (Mandalika) (54,71 km)

**PROGRAM Cipta Karya:**

- Pembangunan SPAM KSPN Pantai Selatan;
- Pembangunan Kawasan Pariwisata Mandalika;
- Penanganan Sanitasi KSPN Mandalika;
- Penanganan Kawasan Destinasi Wisata Kawasan Mandalika;
- Pembangunan TPA Sampah Kab. Lombok Utara
- Pembangunan TPST Skala Kawasan Gili Trawangan;
- Pembangunan TPS 3R Kab. Lombok Barat

**PROGRAM Perumahan:**

- Bantuan stimulan rumah swadaya di Kab. Lombok Tengah (200 unit, 2018)

**PROGRAM Bina Marga:**

- Peningkatan Jalan Akses Likupang
- Pembangunan Jembatan Bitung-Pulau Lembeh
- Jalan Tol Manado - Bitung

**PROGRAM Cipta Karya:**

- Penataan Kawasan Bunaken
- Penataan Kawasan Pantai Malalayang
- Penataan Kawasan Wisata Pantai PAAL-Likupang.

**PROGRAM Sumber Daya Air:**

- Bendungan Kuwilkawangoan di Kabupaten Minahasa Utara

**PROGRAM Bina Marga:**

- Peningkatan Jalan dan Penataan Trotoar dan Drainase Dalam Kota Labuan Bajo (Soekarno Hatta, Cs)
- Peningkatan Jalan dan Penataan Trotoar dan Drainase Kawasan Pariwisata Batu Cermin
- Peningkatan Jalan Kawasan Pariwisata Waecicu
- Shortcut Pembangunan Jalan Akses Bandara Komodo

**PROGRAM Cipta Karya:**

- Penataan Bangunan KSPN Komodo di Kawasan Puncak Waringin
- Penataan Kawasan Pantai Marina-Bukit Pramuka
- Pengembangan Kawasan Batu Cermin
- Pembangunan IPLT Kab. Manggarai Barat
- Fasilitas Penunjang Wisata Pulau Rinca

**PROGRAM Perumahan:**

- Pengembangan perumahan kawasan pariwisata (peningkatan kualitas rumah swadaya homestay)
- Pembangunan perumahan kawasan pariwisata (pembangunan baru rumah swadaya homestay)

**PROGRAM Sumber Daya Air:**

- Penyediaan air baku Labuan Bajo
- Pengendalian banjir Sungai Wae Mese
- Pembangunan pengaman pantai di Pulau Papagaran, Kampung Rinca dan Kerora, Pulau Kukusan, Pulau Messah dan Pulau Komodo
- Design and Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Pantai Pulau Rinca dan Loh Buaya
- Penyediaan air baku Wae Rebo
- Penyediaan air baku Kelimutu

**PROGRAM Bina Marga:**

- Preservasi rehabilitasi Jalan Merek-Tanjung Dolok-Parapat-Bandara Silangit (99,98 km);
- Pembangunan jalan akses bandara Sibisa (5 km);
- Preservasi & pelebaran jalan Pangururan-Ambarita-Tomok-Onan Rungu (5,9 km);
- Preservasi & pelebaran jalan Pangururan-Nainggolan-Onan Rungu (5,9 km);
- Rehabilitasi Mayor Merek-Bts. Kab. Simalungun (2 km);
- Peningkatan kualitas jalan akses Sipinsur (4 km)

**PROGRAM Cipta Karya:**

- Pembangunan SPAM KSPN Danau Toba (MYC);
- Pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba;
- Penataan Kawasan Tomok-Tuktuk-Siadang;
- Pembangunan RTH Tongging Kec. Merek, Kab. Karo

**PROGRAM Perumahan:**

- Bantuan stimulan rumah swadaya di Kab. Toba Samosir (199 unit)

**PROGRAM Sumber Daya Air:**

- Pelebaran Alur Tano Ponggol (MYC)

D.I.Yogyakarta

Lombok, NTB

Sulawesi Utara

Nusa Tenggara Timur

Sumatera Utara



# Permata Indah di Timur Indonesia

Pulau Rote Ndao merupakan pulau yang terdapat di kabupaten Nusa Tenggara Timur, yang memiliki letak terselatan dari Indonesia, dimana Kementerian PUPR melalui BPIW turut mendukung pengembangan potensi perikanan dan potensi wisata serta menyusun rencana pengembangan pulau-pulau kecil terluar di Kabupaten ini.

Tempat yang wajib kita kunjungi, dan menyajikan keindahan luar biasa, serta suasana pantai yang begitu memikat hati dengan segala ketenangan dan panorama alam yang sangat indah. Itulah Pulau Rote Ndao. Pulau Rote Ndao adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang letaknya paling selatan dari Indonesia. Pulau ini memiliki banyak spot keren dan menarik untuk dikunjungi.

Dari pantai hingga danau, bahkan savana dan mata air, destinasi wisata di Pulau ini tidak bisa dianggap remeh, bahkan layak menjadi destinasi liburan kamu berikutnya. Untuk turut mendukung pembangunan infrastruktur disana, Kementerian PUPR melalui BPIW, turut mendukung dalam mengembangkan potensi perikanan di kawasan pesisir dan juga pengembangan potensi wisata serta menyusun rencana pengembangan pulau-pulau kecil terluar di kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT. Rencana

ini disusun berbasis pengembangan wilayah yang berkelanjutan, sesuai dengan potensi sumber daya alam dan kebutuhan pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan kota-kota sekitarnya. Tertarik melakukan penjelajahan di pulau ini? Berikut berbagai destinasi yang dapat dikunjungi antara lain:

## 1. Pantai Tolanamon

Pantai Tolanamon yang terletak di Kecamatan Rote Selatan, kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur memang belum banyak dikenali wisatawan lokal apalagi wisatawan asing.

Pantai dengan ciri khas air yang jernih dan dikelilingi oleh bukit-bukit yang tidak terlalu tinggi, membuat tempat ini menjadi buruan para wisatawan untuk menikmati liburan yang indah, sebuah tempat dimana orang-orang berkumpul untuk menenangkan pikiran dan menikmati liburan. Untuk mencapai pantai tersebut pengunjung dapat menggunakan mobil atau sepeda

motor, dengan jarak tempuh dari ibukota Kabupaten Rote Ndao yakni Ba'a menuju Desa Inaoe sejauh 24 kilometer. Setelah tiba di Desa Inaoe perjalanan menuju pantai ke arah timur sekitar 4 kilometer, dengan kondisi jalan yang belum diaspal. Tapi, perjuangan akan terbayar begitu tampak tebing karang seakan tersenyum sembari menyapa selamat datang di Pantai Tolanamono.

## 2. Telaga Nirwana

Telaga yang mempunyai keindahan yang luar biasa dengan air yang jernih dan tidak terlalu dalam disana, kita bisa menikmati mandi atau sekedar mencuci muka untuk menghilangkan rasa lelah dan penat. Ini adalah sebuah tempat rekreasi yang begitu menyenangkan dan membuat kita merasa betah karena jauh dari kebisingan kendaraan bermotor, sebuah tempat yang wajib kunjungi tatkala anda berada di Rote Ndao.

Pemandangan asri nan menyejukan hati pengunjung dikala tiba di pantai indah dengan telaganya yang sangat mempesona, itulah Telaga Nirwana. Telaga Nirwana yang berada kurang lebih 200 meter dari bibir pantai Buadale tepatnya di Dusun Kotalai Desa Oeseli, kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT.

Pemandangan makin indah, di tengah telaga tersebut terdapat sebuah lempengan batu besar berbentuk hati yang dikelilingi bentangan pasir putih di dasar air yang tembus pandang, dengan kedalaman air setinggi pinggang orang dewasa. Jika anda akan mengunjungi telaga ini, pengunjung dapat menyewa sampan milik nelayan di bibir pantai Buedale dan bertolak dengan mendayung sampan tersebut sekitar 200 meter.

## 3. Danau Laut Mati Rote Ndao

Danau laut mati ini terletak di Desa Sotimori Kecamatan Landu Leko. Danau yang begitu cantik dan mempesona ini dikelilingi oleh bukit-bukit yang sangat indah dan sangat menyenangkan

apabila menggunakan jet ski mengelilingi pulau-pulau kecil yang berada di dalamnya.

Di bukit tersebut kita bisa juga menikmati *sunrise* dari balik atol yang menyerupai pulau kecil di tengah lautan luas. Ekosistem biota bawah laut pada danau ini patut untuk diteliti, sebab sangat memenuhi unsur dan ekosistem yang dimiliki oleh laut yaitu mangrove dan lamun adalah penyeimbang iklim dan penyerapan karbon yang habitatnya di tepi pantai bukan ditengah hutan.

Danau dengan panjang hampir 4 km dan lebar hampir 3 km membuat danau ini sangat unik dan berbeda dari danau-danau lain yang berada di pulau Rote. **(Indira/ dari berbagai sumber)**



Telaga Nirwana.



Pantai Tolanamon Rote

Sumber foto: IDN TIMES



## Survei untuk Jembatan Batam-Bintan



memerlukan perhatian khusus. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menindaklanjuti rencana ini dengan kajian dan survei lapangan.

Kepala BPIW didampingi Tim BBPJN /P2JN Provinsi Kepulauan Riau melakukan survei ke lapangan. Survei dilakukan untuk meninjau *landing point* rencana kaki jembatan Batam-Bintan di sisi Bintan (Tanjung Uban) untuk rencana trase lama/awal.

Kepala BPIW, Hadi Sucahyono, mengatakan selain aspek-aspek teknis terkait informasi-informasi *underground* (aspek geologi),

design teknis jembatan karena melalui palung yang dalam, aspek nilai tambah dan manfaat pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini perlu dikawal semua pihak. Dalam waktu dekat pihaknya akan duduk bersama dengan para pemangku kepentingan.

Rencana pembangunan Jembatan Pulau Batam-Pulau Bintan terus dikaji mengenai keterpaduannya dengan pengembangan wilayah/kawasan, serta daya dukungnya. Saat ini, Program pembangunan jembatan ini sudah disebut di dalam peraturan pemerintah berupa Peraturan Presiden, RPJMN 2020 - 2024, dan RTR Pulau Sumatera sehingga termasuk program yang

## Aspek Kebencanaan Masuk Program NUDP

Beberapa daerah di Indonesia sampai saat ini masih mengalami bencana alam. Mengingat pentingnya upaya mengantisipasi masalah tersebut, aspek kebencanaan masuk dalam *National Urban Development Project* (NUDP) yang saat ini tengah disusun. Program tersebut menjembatani penataan tata ruang, infrastruktur, dan implementasi penataan kota-kota di Indonesia.

Kepala BPIW, Hadi Sucahyono mengatakan, kebanyakan produk perencanaan yang lama belum ada aspek kebencanaan. Sehingga, kedepan termasuk dalam NUDP perlu masuk aspek kebencanaan.

Program NUDP dibuat atas kerja sama BPIW Kementerian PUPR dengan Kementerian



Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/ BPN).

## BPIW Siapkan Draft Renstra Kementerian PUPR 2020-2024

BPIW saat ini tengah menyusun Rancangan Teknokratik Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Tema rancangan teknokratik ini sesuai dengan misi RPJMN 2020-2024 yaitu "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya infrastruktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing".

Kepala BPIW, Hadi Sucahyono mengatakan, rancangan teknokratik Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 akan ditetapkan menjadi Renstra Kementerian PUPR oleh Presiden RI pada 2020. Renstra akan memuat prioritas nasional yang sejalan dengan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Prioritas nasional tersebut diantaranya, yang pertama adalah penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kedua mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga adalah upaya meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Keempat, membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Kelima, Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi. Dan yang terakhir, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi.

## Pengembangan Danau Toba Fokus pada Aksesibilitas



Danau Toba di Sumatera Utara merupakan salah satu obyek wisata super prioritas yang dikembangkan pemerintah. Terkait hal itu Kementerian PUPR memfokuskan pada dukungan aksesibilitas menuju destinasi wisata tersebut. Disamping itu perlu memperbanyak aksesibilitas, karena wisatawan itu harus punya banyak pilihan, baik dari udara, laut, maupun darat.

Kepala BPIW, Hadi Sucahyono mengatakan, dibangunnya ketiga akses itu bertujuan memberikan keleluasaan bagi wisatawan yang hendak melakukan perjalanan dan mengelilingi kawasan wisata Danau Toba.

Pengembangan kawasan wisata Danau Toba dilakukan dengan keterpaduan tiga sektor yakni Bina Marga, Sumber Daya Air (SDA) dan Cipta Karya. Perwujudan keterpaduan ini, salah satunya melalui pembangunan *waterfront city* di Tano Ponggol.



## Hadirkan Referensi Perkotaan, BPIW Susun Buku SOIC 2019



Keragaman budaya dan alam yang dimiliki Indonesia, membuat perkembangan kota-kota di Indonesia dinilai akan berkontribusi bagi pembangunan perkotaan di Asia bahkan dunia.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, BPIW saat ini sedang menyusun buku SOIC 2019.

Buku ini merupakan pembaruan dan penajaman dari buku SOIC 2017 yang telah diterbitkan BPIW.

## Pagu Anggaran 2020 Sebesar Rp 199,3 M



Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, pagu anggaran BPIW TA 2020 akan dialokasikan untuk mendukung tujuan tugas dan fungsi BPIW menyelenggarakan perencanaan keterpaduan infrastruktur PUPR.

Antara lain untuk dukungan perencanaan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Pariwisata, Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi serta Kawasan Metropolitan sebesar 34,8 M.

Pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2020 untuk Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai sebesar Rp 199,3 Miliar.

## Mantapkan Substansi ITMP, Tim Kunjungi Lombok

Untuk melakukan percepatan dalam pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Lombok secara terpadu yang didukung Bank Dunia melalui *Integrated Tourism Development Program* (ITDP), Pemerintah menguatkan dan menajamkan substansi *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP)/Rencana Induk Pariwisata Terpadu KSPN Lombok.

Kegiatan itu dilakukan dengan kunjungan lapangan bersama di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tinjauan tersebut dilakukan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Kelompok Kerja (Pokja) Koordinasi Pengembangan Pariwisata

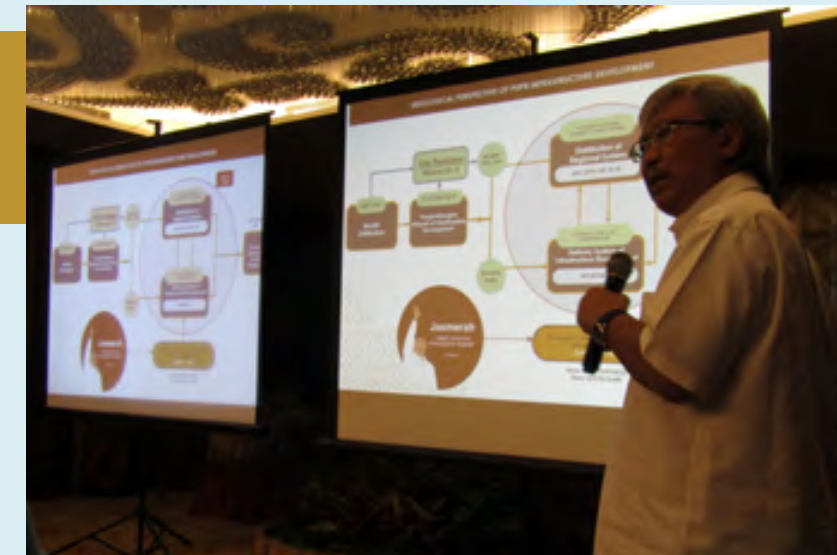


Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB), serta Indonesia *Tourism Development Corporation* (ITDC). Kegiatan tersebut diawali pertemuan tim dengan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian hasil *Focus Group Discussion* (FGD) Penguatan Substansi ITMP Lombok kepada Tim Pokja Daerah serta Pemaparan Kesiapan Penyelenggaraan Moto GP Mandalika di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB.

## Output dan Peran BPIW Dipertajam

BPIW Kementerian PUPR melakukan penajaman *output* dan peran BPIW tahun 2020-2024 melalui indentifikasi resiko Tusi BPIW 2015-2019 sebagai upaya perumusan *Blue Print* Pengembangan Organisasi BPIW kedepan yang dapat mendukung arahan keterpaduan kebijakan program pengembangan infrastruktur wilayah sektor Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan (ABCP) di lingkungan PUPR.

Kegiatan ini nantinya akan bermuara pada penguatan struktur organisasi. Penguatan tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Menteri. Penguatan Organisasi BPIW akan difokuskan kepada struktur yang semula lebih diutamakan pada perwilayahan yang bersifat



sektoral seperti, pulau, kawasan, dan kota/desa, menjadi perwilayahan nasional berbasis pulau dan kepulauan sebagai satu kesatuan unit perencanaan.



# Inilah 5 Destinasi Wisata yang Semakin Mudah Diakses Wisatawan

Salah satu dukungan Kementerian PUPR terkait pengembangan sektor pariwisata, yakni dengan membangun jaringan jalan menuju destinasi wisata. Keberadaan infrastruktur yang mumpuni dapat mendukung percepatan terwujudnya pengembangan

pariwisata. Pasalnya, keberadaan jalan yang memadai dapat memberikan kemudahan bagi calon wisatawan untuk menjangkau destinasi wisata. Berikut lima destinasi wisata yang semakin mudah diakses wisatawan versi Buletin Sinergi.



## 1. Candi Borobudur

Candi Borobudur merupakan destinasi candi yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta.

Moda transportasi untuk menuju destinasi wisata ini sudah banyak pilihan. Selain transportasi darat, hadir juga tiga bandara besar di kawasan ini, yakni bandara di Yogyakarta, Semarang dan Surakarta. Sarana dan prasarana di sekitar kawasan wisata ini juga sudah berkembang dengan baik.

## 2. Danau Toba

Untuk menuju kawasan destinasi wisata Danau Toba sudah terbilang mudah. Dari Bandara Silangit wisatawan bisa menggunakan bus atau travel yang dapat dipesan sebelum atau setelah tiba di Bandara.

Dengan jarak tempuh kurang dari satu jam, wisatawan bisa menuju perbukitan yang dapat melihat langsung panorama alam dan keindahan Danau Toba. Bukit pertama adalah Huta Ginjang dan selanjutnya Geosite Sipinsur. Di kedua area tersebut, wisatawan dapat menikmati pemandangan Danau Toba dari atas bukit. Kini telah tersedia moda transportasi yang memudahkan wisatawan mengakses Danau Toba.



## 5. Pantai Tanjung Kelayang

Pantai Tanjung Kelayang merupakan salah satu pantai yang terletak di Kepulauan Bangka Belitung. Lokasinya berada di Kecamatan Sijuk dan berjarak sekitar 27 kilometer dari Tanjung Pandan yang merupakan ibu kota Kabupaten Belitung. Pantai ini merupakan salah satu lokasi syuting film Laskar Pelangi di samping Pantai Tanjung Tinggi. Tidak jauh dari Pantai Tanjung Kelayang, pengunjung juga dapat menemukan Pulau Lengkuas yang memiliki mercusuar.



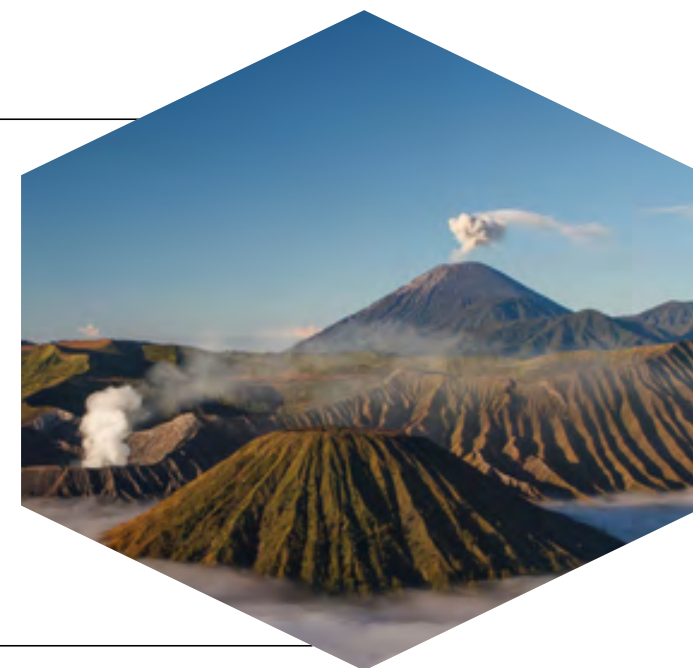
## 3. Kuta Mandalika

Jarak dari Bandara Internasional Lombok ke Kuta Mandalika sekitar 24 km dan waktu tempuh sekitar 50 menit menggunakan mobil. Kuta Mandalika menjadi salah satu destinasi utama ketika berkunjung ke Lombok, terlebih ketika daerah ini telah dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Semakin banyak wisatawan, khususnya wisatawan domestik yang menjadikan Kuta Mandalika di daftar destinasi wisata yang harus dikunjungi. Selain itu, Kuta Mandalika juga memiliki pesona sendiri diantaranya pantainya yang masih bersih dan pasirnya yang unik.

## 4. Bromo Tengger Semeru

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan destinasi wisata yang berada di Jawa Timur, Indonesia. Puncak gunung yang banyak dikunjungi wisatawan ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan berada dalam empat wilayah kabupaten. Jarak dari Bandara Sidoarjo ke Tengger Semeru sekitar 112 KM.

Akses untuk menuju kawasan destinasi wisata tersebut relatif mudah. Tersedia moda transportasi darat. Keberadaan sarana dan fasilitas wisata di kawasan ini juga sudah berkembang baik. Sehingga, membuat wisatawan betah berkunjung lebih lama.





# TEKNOLOGI TIMBUNAN RINGAN MORTAR BUSA

Material ringan, merupakan salah satu opsi pilihan penanganan permasalahan timbunan di atas tanah lunak. Material ringan Mortar-Busa merupakan campuran semen+pasir +air disatukan dengan *foam agent* +air. Kriteria teknis mortar-busa untuk material timbunan jalan sebagai berikut:

- Nilai kepadatan basah (*wet density*) dari material campuran atau mortar sebesar 6 kN/m<sup>3</sup> (lapis bawah fondasi/*sub base*) dan 8 kN/m<sup>3</sup> (lapis atas fondasi/ *base*)
- Mempunyai nilai *flow (Flowability)*, yang diindikasikan untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan bila menggunakan alat penyemprot sehingga mencapai jarak yang ideal, nilai *flow* ditetapkan sebesar 180 ± 20 mm.
- Kuat tekan UCS (*unconfined compressive strength*) sebesar minimum 800 kN/m<sup>2</sup> (lapis bawah fondasi/*sub base*) dan minimum 2000 kN/m<sup>2</sup> (lapis atas fondasi / *base*),

Bahan timbunan ringan merupakan 'Foamed Embankment Mortar' dengan beberapa keunggulan dan kegunaan secara optimal, sebagai berikut :

- Beratnya ringan dan kekuatan cukup tinggi untuk *subgrade* dan fondasi perkerasan jalan; Berat isi dan kuat tekan campuran ini dapat didesain sehingga dapat mengurangi tekanan lateral tanah pada suatu struktur bangunan *abutment* fondasi jembatan dan mengurangi dampak penurunan pada badan jalan diatas tanah lunak.
- Dapat memadat sendiri (*self compacted*), karena berperilaku seperti mortar beton dimana material campuran dapat mengeras sesuai dengan waktu pemeraman (*curing time*) yang ditetapkan.



- Karena berupa campuran 'Foamed Embankment Mortar', maka memiliki perilaku tahan terhadap perubahan karakteristik propertis akibat *physical* atau *chemical process* selama massa konstruksi pelaksanaannya dan memiliki daya dukung kekuatan yang cukup memadai sebagai fondasi perkerasan jalan.

Teknologi *Courgated* Mortar Busa ini dikembangkan karena luasnya deposit tanah lunak di Indonesia yang sering mengakibatkan terjadinya keruntuhan timbunan dan penurunan berlebih. Mempunyai massa jenis maksimum 0,8 ton/m<sup>3</sup> untuk lapis *base* dengan UCS minimum 2000 kg/cm<sup>2</sup>, serta massa jenis maksimum 0,6 ton/m<sup>3</sup> untuk lapis *sub base* dengan UCS minimum 800 kg/cm<sup>2</sup>. Penelitian dan pengembangan terhadap timbunan ringan mortar busa difokuskan untuk menghasilkan berat isi yang ringan tapi mempunyai kekuatan yang memadai. Timbunan ringan mortar busa terdiri dari semen, zat

busa berbahan dasar protein dan pasir yang dicampur sedemikian rupa sehingga bersifat memadat sendiri (*self compacted*).

Pedoman ini menetapkan ketentuan dan prosedur perencanaan teknis material ringan mortar-busa untuk konstruksi jalan, yang meliputi karakteristik material ringan mortar-busa, penyelidikan geoteknik, dan kriteria perencanaan dengan material ringan mortar-busa. Kriteria perencanaan timbunan material ringan mortar-busa untuk konstruksi jalan terdiri dari perhitungan tinggi kritis, perhitungan penurunan, serta perhitungan stabilitas timbunan. Pedoman ini hanya membahas mengenai perencanaan teknis material ringan mortar-busa untuk konstruksi jalan di atas tanah lempung lunak (tidak termasuk gambut) dan tidak membahas mengenai perencanaan material ringan mortar-busa untuk timbunan oprit jembatan.



Material

## Ringan Mortar Busa

Campuran material ringan yang dihasilkan sangat cair, namun melalui reaksinya dengan bahan baku busa, material ringan tersebut akan mengeras dengan nilai kuat tekan yang sama dengan material berkualitas sangat baik hingga baik.

Bahan-bahan yang digunakan dalam campuran material ringan mortar-busa

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Semen, dengan spesifikasi yang merujuk pada SNI 15-2049-2004, SNI 15-7064-2004, SNI 15-0302-2004;
- Agregat, dalam hal ini pasir, harus memenuhi gradasi pasir untuk mortar-busa sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis. Pasir harus mempunyai butiran-butiran yang keras dan awet (*durable*). Pasir harus bebas dari kotoran organik, dengan pengujian untuk menentukan adanya bahan organik dalam pasir alam yang akan digunakan sebagai bahan campuran mortar atau beton merujuk pada SNI-2816-1992;
- Busa, mengandung protein nabati atau sejenisnya yang dapat menghasilkan gelembung terpisah yang stabil sehingga dapat menghasilkan campuran material ringan yang memenuhi spesifikasi teknis;
- Air, harus sesuai dengan yang disyaratkan di dalam SNI 7974:2013.

Keunggulan dari Mortar Busa Ini:

1. Dapat digunakan sebagai lapis fonsadi bawah pada lokasi tanah lunak
  2. Dapat digunakan sebagai jalan pendekat jembatan
  3. Meminimalkan masalah penurunan timbunan
  4. Mengatasi masalah stabilitas timbunan
  5. Tidak dibutuhkan dinding penahan tanah timbunan.
  6. Tidak dibutuhkan pemadatan
- Untuk lokasi penerapan teknologi timbunan ringan mortar busa ini terdapat di Kedaton, Pangkalan Bun, dan Lahat. (Sumber: Pusat Jalan dan Jembatan Balitbang)

Teknologi timbunan ringan Mortar Busa dikembangkan karena luasnya deposit tanah lunak di Indonesia yang sering mengakibatkan terjadinya keruntuhan timbunan dan penurunan berlebih.





# CPNS BPIW Ikuti Live Streaming Presidential Lecture 2019



Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala BPIW, Hasna Widiastuti menyampaikan arahan kepada CPNS BPIW sebelum mengikuti bersama kegiatan Presidential Lecture 2019.



Sejumlah CPNS menyampaikan pendapat dalam diskusi usai menyimak Presidential Lecture 2019 yang disampaikan Wakil Presiden, Yusuf Kalla.



CPNS BPIW berdiskusi mengangkat tema pesan-pesan dari Wakil Presiden, Yusuf Kalla.



Tim Bagian Kepegawaian dan Ortala sama CPNS BPIW menyimak bersama Presidential Lecture 2019.

” Dalam rangka bimbingan dan pembinaan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR mengikuti bersama Presidential Lecture 2019 melalui tayangan live televisi nasional di Ruang Rapat Utama BPIW, Rabu (24/7) lalu. Materi Presidential Lecture yang mengangkat tema “Sinergi untuk Melayani” itu disampaikan langsung Wakil Presiden RI, H M Jusuf Kalla di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dalam acara tersebut, Wakil Presiden mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mengetahui dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. (ris/infoBPIW) ”

## Quiz BPIW

EDISI 40

### PERTANYAAN

1. Sebutkan 5 destinasi pariwisata super prioritas yang ditetapkan pemerintah!
2. Sebutkan salah satu dukungan infrastruktur Kementerian PUPR di KSPN Danau Toba!

### KETENTUAN

Dua orang pemenang akan mendapatkan *souvenir cantik* dari BPIW. Jawaban disampaikan melalui email : [humasbpiw@pu.go.id](mailto:humasbpiw@pu.go.id). Jawaban juga dapat disampaikan melalui *WhatsApp No: 0812-9897-4748* disertakan *scan KTP, nomor kontak, dan alamat pengiriman souvenir*. Jawaban dan nama pemenang akan diumumkan pada edisi 41, Agustus-September 2019.



### JAWABAN KUIS EDISI 39

#### Jawaban

1. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Presiden 15 Tahun 2015 dan Permen PUPR no. 3/PRT/M/2019 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian PUPR
2. Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR
3. Ir. Hadi Sucahyono, MPP, Ph.D

### PEMENANG KUIS EDISI 39

1. Bramantyo Herawanto  
Cimahi Utara





## TINDAKAN CEPAT MENGHADAPI GEMPA



Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia dan juga di beberapa negara lain. Di Indonesia, gempa sering terjadi karena negara ini terletak pada pertemuan tiga lempeng utama dunia, yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh aktivitas gunung berapi dan jatuhnya bebatuan. Kita pernah membayangkan ketika sedang asyik atau sibuk dengan aktivitas, tiba-tiba saja berguncang tanda bencana gempa bumi datang. Suasana gempa bumi seperti itu mungkin saja terjadi. Kejadian gempa mungkin tidak dapat diprediksi oleh masyarakat umum. Bahkan ketika menjalani aktivitas harian, tidak pernah akan terpikir untuk terjadi gempa. Berikut hal yang dapat dilakukan ketika bencana gempa bumi terjadi:

### 1. Hindari tempat-tempat Berbahaya

Jika kita berhasil berada di luar ketika terjadi gempa, waspadai bangunan dan pohon tinggi. Jauhi bangunan dan tiang-tiang tinggi karena sangat berbahaya jika rubuh. Gempa terkadang juga menimbulkan tanah longsor, jadi hindari pula kawasan dekat tebing atau jurang, usahakan untuk bisa berada di alam terbuka dan tanah lapang. Jika kamu tinggal dekat dengan pantai, hal yang harus dilakukan saat gempa adalah sebaiknya segera berlari menjauh dari bibir pantai. Sebab, saat gempa terjadi, selalu muncul kemungkinan terjadinya tsunami. Apalagi, bila titik gempanya terjadi di laut.

Hal itu akan meningkatkan kemungkinan terjadinya tsunami. Jika kita berada di dalam rumah sebaiknya kita dapat segera berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak berada dekat dengan lemari atau barang pecah belah dan segera keluar dari rumah begitu getaran gempa selesai. Selain itu, pikiran yang fokus itu akan membantu kita untuk melakukan tindakan penyelamatan dengan tepat. Kita dapat langsung bertindak tepat dengan pikiran yang fokus dan tetap tenang.

Berlari menjauh dari bibir pantai setidaknya meningkatkan presentase keselamatan kita. Berlarilah menuju tempat yang lebih tinggi agar kamu tidak terjangkau dari hampasan tsunami. Adapun, kamu jangan menuju gedung untuk menghindari tsunami. Sebab, bisa jadi malah fondasi gedung tersebut bisa runtuh akibat guncangan gempa.

### 2. Jangan Panik

Hal yang harus dilakukan saat gempa pertama kali dan paling utama adalah jangan panik. Bila kita panik, kita tidak dapat berpikir jernih dan malah akan membuatmu terjebak dengan situasi yang membahayakan. Supaya bisa tenang saat gempa terjadi, kita harus fokus. Yang pertama kali kita lakukan adalah tarik napas terlebih dahulu sebelum bertindak. Ingat apa saja yang harus diselamatkan pertama kali. Tentu saja, hal yang harus diselamatkan pertama kali ialah orang-orang terdekat. Selain itu, pikiran yang fokus itu akan membantumu untuk melakukan tindakan penyelamatan dengan tepat. Kita dapat langsung bertindak tepat dengan pikiran yang fokus dan tenang.

### 3. Matikan Kompor

Ketika terjadi gempa, ingatlah untuk mematikan kompor. Sebab, saat gempa terjadi, bila kompor masih menyala dapat berpotensi meledak dan terjadinya kebakaran. Untuk itu sebaiknya kita harus segera mematikan kompor. Selain itu, baiknya kita juga jauhi daerah dapur saat gempa terjadi. Agar, saat terjadi kompor meledak, kita dapat lebih cepat mengamankan diri dan tidak terkena dampak ledakannya.

Adapun, untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran saat gempa, kamu harus menempatkan satu ember air dan kain basah di sekitar lokasi kompor. Dengan begitu, saat kompor terlihat akan terbakar, kamu bisa mematikannya langsung dengan kain basah.

## Obrolan

Bang Egi merupakan tokoh kartun dalam Obrolan, dan Egi juga sapaan akrab dari "Sinergi".

## BANG EGI



### Destinasi Pariwisata Super Prioritas







**Buletin Sinergi ini dapat didownload melalui:  
[bpiw.pu.go.id/publication/bulletin](http://bpiw.pu.go.id/publication/bulletin)**



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)  
Kementerian PUPR**